



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: 7 (Tujuh)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri PPN/Kepala Bappenas
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 6 November 2019
Waktu	: 15.00 WIB s.d 18.28 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat	: H. Dito Ganinduto, M.B.A.
Sekretaris Rapat	: Drs. Urip Soedjarwono
Acara	: Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020
Hadir	: MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS/Dr. HC. Ir. H. SUHARSO MONOARFA

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F-PG):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom,

Om Swasti Astu,

Namo budaya,

Salam kebajikan.

**Yang terhormat Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajarannya,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,
Dan hadirin yang berbahagia.**

Menurut laporan dari Sekretariat, hadir rapat telah ditandatangani oleh 39 orang, 9 fraksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, ijin kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.00 WIB)

Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali Rapat Kerja hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Hadirin yang kami hormati.

Agenda Rapat Kerja pada hari ini terkait dengan evaluasi kinerja Kementerian PPN/Kepala Bappenas tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam Rapat Kerja pada tanggal 19 Agustus 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa penyerapan anggaran Bappenas sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 masih di bawah perkiraan yang diperkirakan bisa mencapai hampir 60% namun hanya bisa terserap 44%. Sedangkan pada tahun 2020 rencana kerja dan anggaran kementerian PPN/Bappenas dalam era APBN tahun 2020 yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang disampaikan kepada Komisi XI DPR RI pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp1.828.689.846.000,- dengan rincian sebagai berikut.

1. Perencanaan pembangunan nasional anggaran tahun 2020 Rp948.439.846.000,-
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp870.260.000.000,-
3. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Rp10 miliar. Rp1.828. Jumlah Rp1.828.689.846.000,-

Pada tahun 2020 Kementerian PPN/Kepala Bappenas mencanangkan 3 program utama, yaitu:

- a. Program perencanaan pembangunan nasional.
- b. Pengurangan kesenjangan wilayah.
- c. Kordinasi mengenai pemindahan ibu kota negara.

Dalam kesempatan Rapat Kerja ini, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kerja Kementerian PPN/Kepala Bappenas tahun 2019 serta permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan bagaimana mencapai target yang telah ditetapkan.

Komisi XI DPR RI juga ingin mengetahui rencana kerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020. Program-program prioritas apa saja yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia serta percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal. Serta bagaimana proses rencana pemindahan ibu kota negara, baik dalam bentuk penyiapan regulasi, penyiapan rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun juga menyusun kajian lingkungan hidup strategis untuk mendukung master plan yang nantinya akan menjadi kegiatan utama dari pemindahan ibu kota.

Untuk menyingkat waktu kami persilakan kepada saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyampaikan penjelasannya. Tapi sebelumnya mungkin berikanlah kami kesempatan untuk memperkenalkan karena ini kita rapat perdana, perkenankan Anggota Komisi XI DPR RI. Mungkin dimulai dari Ibu Siti dulu.

Silakan.

F-PD (Hj. SITI MUFATTAHAH, P.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas yang saya hormati beserta jajarannya.**

Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu disini yang tadinya jam 14.00 WIB menjadi Jam 15.00 WIB, tapi *alhamdulillah* pada akhirnya kita dapat bertemu juga dengan Bapak Menteri.

Perkenalkan nama saya Siti Mufattahah dari Fraksi Partai Demokrat, Dapil Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, dan Kota Tasikmalaya.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PKB (ALI AHMAD):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Bapak Menteri beserta jajarannya.

Perkenalkan saya Ali Ahmad dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, nomor A-040 dari Dapil Jatim V Malang Raya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PKS (Ir. H.A. JUNAIDI AULY, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang kami hormati Ketua dan Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang kami hormati Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajarannya.**

Nama saya Ahmad Junaidi Auly, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nomor Anggota A-421, Dapuil Lampung II, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Waikana, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi XI DPR RI dan Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat,
Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya.**

Nama saya Hidayatullah, dari Dapil Sumut I, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Kota Tebing. Dari Partai Keadilan Sejahtera.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ijinkanlah memperkenalkan diri, nama saya Harry Poernomo, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Nomor Anggota A-100, mewakili Daerah Pemilihan Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosono.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PG (H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri yang saya hormati.

Saya pikir kita ini patut berbahagia karena kita bermitra dengan Bapak Menteri yang sudah tahu persis apa yang akan dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Jadi saya pikir rapat kita ini sangat enaklah, karena Bapak Menterinya pernah jadi Anggota DPR RI, 2 kali jadi Menteri, jadi saya kira tahu persis apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan.

Jadi saya terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas yang saya hormati. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu, tadinya kami ini bermitra dengan beliau pada saat beliau menjadi Menteri Perumahan Rakyat. Jadi oleh karena itu, saya katakan ini sudah paham, mungkin rapat kita ini terserah kita mau lanjut atau bagaimana tinggal baca.

Bapak Menteri, nama saya Muhidin Mohammad Said, dari Dapil Sulawesi Tengah, dari Fraksi Partai Golkar. Jadi nanti kita temu lagi di Banggar, jadi Bapak Menteri paham betul ini jadi enak. Teman-teman dari Bappenas ini saya kira berbahagia mendapatkan Bapak Menteri yang seperti ini, paham seluruh permasalahan.

Saya kira demikian Bapak Menteri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Terima kasih Pimpinan.

Selamat kepada Bapak Menteri dan seluruh jajarannya.

Perkenalkan nama saya Sihar Sitorus, Nomor Anggota A-139, sehingga saya kurang paham dengan apa yang dibicarakan. Saya datang dari Dapil Sumatera Utara II, yang meliputi 3.631 desa. Dari Fraksi PDI Perjuangan.

Terima kasih.

F-PDIP (DOLFIE, O.F.P):

Terima kasih Pimpinan.

Perkenalkan Bapak Menteri, saya Dolfie dari Fraksi PDI Perjuangan. Dapil Jawa Tengah IV, Karangnganyar, Sragen, Wonogiri. Harapan kami karena Bapak Menteri sudah pernah di DPR RI, tentu komunikasi kita bisa lebih lancar Pak. harapan-harapan kita tanpa diungkapkan Bapak Menteri bisa langsung tahu.

Terima kasih.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Izin Pimpinan, perkenalkan.

Bapak Menteri beserta jajaran.

Nama saya Puteri Komarudin dari Dapil Jawa Barat meliputi Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi, dari Fraksi Partai Golkar.

Terima kasih.

F-PD (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I.):

Menyambung, izin Pimpinan.

Bapak Menteri beserta jajarannya.

Saya Ela Siti Nuryamah, dari Dapil Lampung II, 7 Kabupaten, dari Fraksi PKB.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (Ir. SOEPRIYATNO):

Terima kasih.

Saya kira tadi harapan teman-teman Bapak Menteri juga sudah tahu, jadi saya perkenalkan diri. Nama saya Ir. Soepriyatno. Saya dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil Jawa Timur VIII, Nomor Anggota A-113.

Terima kasih.

F-P. NASDEM (SATORI, S.Pdi., M.M.):

Terima kasih.

Seizin Pimpinan Komisi, saya Satori, Fraksi Nasdem, Nomor Anggota A-368, Dapil Jawa Barat VIII, meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon serta Indramayu. Tidak hadir tidak enak karena saya berada di lantai 15 yang punya lantai Fraksi PPP.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Agun.

F-PG (Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M..Si.):

Saya Agun Gunandjar, masih di Partai Golkar, periode yang keenam dari Dapil Jabar X, Ciamis, Banjar, Kuningan.

Terima kasih.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan saya temannya Bapak Harso, karena kita sama-sama dulu di Badan Anggaran, beliau ini adalah sosok politikus yang cukup handal, Jadi kalau bicara masalah *master plan* atau *blue print* Bappenas saya yakin beliau sangat memahami. Luar biasa karena kami juga cukup bangga bisa mempunyai Menteri Bappenas sebagai mitra kerja Komisi XI DPR RI. Beliau ini di dalam rezim yang berbeda terus berkibar.

Dulu menterinya jaman SBY, sebagai Menteri Perumahan, dan sekarang terpilih kembali menjadi Menteri Bappenas. Jadi teman-teman kalau Bapak Suharso ini dari hulu sampai hilir beliau sudah hatam. Jadi kita harap rapat dengan Bappenas tidak usah lama-lama, kita sudah tahu persoalan masalah pembangunan nasional, blue print RPJM dan RPJP-nya. Saya yakin bahwa pemahaman itu lebih asik kalau kita mempunyai Menteri seorang politikus di Bappenas, karena semua yang ada disini adalah mewakili rakyat atau konstituen yang ada di Dapil masing-masing yang punya kepentingan bersama karena kami disumpah Pak, mementingkan, memperjuangkan konstituen daerah pemilihan.

Sehingga ketika Bapak nanti memaparkan blue print Bappenas kami berharap diantara teman-teman ini bisa ada yang tercakup Dapilnya, terutama Dapil saya sama dengan Puteri Komarudin, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, 50 KM dari Jakarta namun masih banyak yang tertinggal disana. Jadi kami membutuhkan satu perubahan yang signifikan terhadap Dapil kami kedepannya.

Saya melihat eselon I disini juga yang II masih baru semua ya, saya kemarin periode 2004-2009, 2009-2014 dan ini periode saya yang ketiga saya daftar tapi belum baru semua. Jadi saya berharap perlu ada sinergitas antara Bappenas dengan Komisi XI DPR RI dalam rangka menciptakan iklim pembangunan nasional yang baik dan menciptakan RPJM yang selaras dengan visi dan misi Presiden Jokowi.

Terima kasih dari saya.

Satu lagi saya dari Partai yang sama Partai Demokrat.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.

Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Suharso yang telah menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas. Bapak Suharso, ijin memperkenalkan diri saya masih teman Ibu Neng di BKSAP Pak, juga masih anak buah Bapak Amir di Komisi XI DPR RI. Saya Heri Gunawan, sisi yang lain dari Dapil Jabar IV dari Fraksi Partai Gerindra.

Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyapa Bapak Sesmen Bapak Hilmayan serta jajaran. Semoga dengan adanya kehadiran Bapak Suharso, rapat kita tidak usah berlama-lama. Tadi ada pesan dari Bapak Amir, 30 menit selesai katanya.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan Bapak Menteri beserta jajarannya, mudah-mudahan mengemban amanah dan Allah memudahkan dalam melaksanakan semua amanah.

Saya Anis Byarwati dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dapil DKI Jakarta I, Jakarta Timur. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

F-P. NASDEM (HASBI ANSHORI, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Bapak Menteri beserta jajarannya.**

Saya Hasbi Anshori A-355, Fraksi Nasdem, Dapil Jambi.
Terima kasih.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Selamat siang.

Perkenalkan saya Andreas Eddy Susetyo, dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapilnya adalah Malang Raya, Kabupaten dan Kota Malang dan Kota Batu.
Terima kasih.

F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Seijin Pimpinan, perkenalkan saya Hj. Wariah, Dapil NTB II, meliputi Lombok, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kota Mataram. Walaupun secara pribadi saya sudah sangat dekat dengan Bapak Menteri, karena saya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Tentu di forum terhormat ini saya ingin sampaikan kedepan mohon Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu perhatian Bapak. Mengingat banyak daerah-daerah terdampak gempa disana, yaitu Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kota Bima. Ini mungkin ada catatan khusus dan terima kasih pada kesempatan hari ini saya mendengar dari semua yang hadir, karena Bapak salah satu alumni Komisi XI DPR RI tentu paham apa yang harus dilakukan kedepan.

Saya kira ini saja dari saya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PG (H. MUHAMMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nama saya Mukhamad Misbakhun Pak, dari Fraksi Partai Golkar Pak Menteri. Saya kalau WA beliau ini saya panggilnya Bapak Pemimpin. Saya dari Jawa Timur II, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Brobolinggo, Kabupaten Probolinggo, dari Fraksi Partai Golkar.

F-PDIP (H. MUSTHOFA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Atas seijin Pimpinan, ijin memperkenalkan nama saya Musthofa dari Dapil Jateng II, Kudus, Jepara, dan Demak, Nomor Anggota A-180. Dari Fraksi PDI Perjuangan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan Bapak Menteri dan jajarannya, saya H. Rudi hartono Bangun, dari Dapil Sumut III, Langkat, Tinggi, Malungun, Siantar dan lain-lain. Dulu waktu pas Bapak Menteri jadi Menteri Perumahan, saya ingat dulu pas saya Ketua DPRD pernah bersama kita ke Pulau Kampe, waktu ada merencanakan disana. Saya dari Fraksi Nasdem Pak, dulu dari Demokrat.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Seijin Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebetulnya saya kalau sama Bapak Harso mungkin tidak perlu memperkenalkan, karena mungkin diruangan ini beliau yang paling kenal saya. Karena saya adalah orang yang dari SMA, sampai kuliah dan seterusnya beliau yang membina dan mengasuh saya. Bisa dibilang ini adalah orang tua kami Pak, dari Gorontalo.

Dan kepada Bapak Menteri Bapak Suharso, sebetulnya kalau di Gorontalo tidak ada yang manggil beliau Bapak Harso, beliau ini orang tua sampai anak muda memanggilnya itu Kak Harso, bukan Pak. Jadi memang beliau ini awet muda terus. Doa dari seluruh rakyat Gorontalo untuk Bapak, mudah-mudahan menjadi Menteri yang sangat baik dan berprestasi untuk negara dan bangsa.

Saya Elnino Bapak-bapak dari Bappenas, dari Partai Gerindra, Provinsi Gorontalo.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LLM):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang terhormat Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran.**

Perkenalkan nama saya Didi Irawadi Syamsudin. Dari Fraksi Partai Demokrat, Dapil Jabar X, Ciamis, Kuningan, Banjar dan Pangandaran, saya Nomor Anggota A-456. Jadi semoga kita bisa bermitra kedepan, ini Bappenas menyangkut bidang yang saya rasa sangat penting, apalagi ada isu pemindahan ibu kota dan lain-lain. Semoga kita bisa bermitra dengan baik, dan doa sukses selalu buat Bapak.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Drs. FATHAN/F-PKB):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya nama Fathan Subchi, Dapil II Jawa Tengah, meliputi Demak, Kudus, dan Jepara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Saya kira selamat Bapak Menteri, teman-teman DPR RI sudah tadi sangat cepat ini antara DPR RI dan Bapak Menteri, pengawasan yang kuat dan DPR RI yang kuat. Pelajaran yang kuat dari Bappenas.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Dr. H.M. AMIR USKARA, M.Kes. /F-PPP):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri yang harus saya hormati, beserta seluruh jajaran Bappenas.

Saya langsung saja nama saya Amir Uskara, saya dari Dapil Sulawesi Selatan I, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri yang terhormat dan seluruh jajarannya.

Saya Dito Ganinduto, saya kira 15 tahun yang lalu saya bersama dengan Bapak Menteri di Banggar dan ibu Eva juga, berarti sudah 15 tahun tapi masih gini-gini saja, dari Komisi ke Komisi, tapi syukur *alhamdulillah*. Dapil Jawa Tengah VIII, Kabupaten Banyumas, Cilacap, dari Fraksi Partai Golkar. Yang *Insy Allah* jadi Partai pemenang tahun depan.

Baik, saya kira cukup ya. Demikian tadi perkenalan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyampaikan pemaparannya.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, dan saya juga mohon maaf tadi ada perubahan ke pukul 15.00 WIB dan kemudian tidak kekejar. Mohon maaf saya yang kedua adalah sejatinya harusnya bahan ini bisa dua hari yang lalu, karena ketika saya duduk sebagai Anggota Dewan, saya akan meminta Menteri itu pulang kalau memberikan bahan itu pada saat yang sama. Jadi saya mohon dimaafkan dulu itu. Yang berikutnya, saya berjanji untuk tidak diulang, mudah-mudahan bisa didengar oleh teman-teman semua di Bappenas.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas penerimaan ini, perasaan saya itu juga bercampur macam-macam, karena biasanya saya juga duduk di tempat beliau-beliau ini dan menunjuk-nunjuk begitu dan mengawas-ngawasi begitu. Dan hari ini mudah-mudahan saudara Misbakhun tidak menunjuk-nunjuk saya, karena dulu beliau yang saya suruh menunjuk menterinya.

Bapak Muhidin juga ini para jagoan semua, apalagi Bapak Agun itu kami itu juga sama-sama di Komisi II DPR RI. Bapak Dolfie, kemudian siapa lagi ini, ini sama-sama dari Malang Bapak Andreas. Meskipun partainya beda, tapi kami pernah di Malang. Jadi perlu saya sampaikan begitu dulu, biar semuanya ada hubungannya sama saya. Karena saudara Elnino tadi sudah mengatakan bahwa saya ayah asuhnya, jadi mudah-mudahan saya bisa bekerja sama dengan baik selama ini, apalagi tadi Ibu Vera sudah mengingatkan itu. Dan semuanya saya kira juga Bapak Didi yang rajin sekali, kalau bertemu saya kita bertegur sapa. Bapak Fathan ini saya tidak tahu Komisi XI DPR RI yang keberapa ini? yang kedua ya. Kalau Bapak Dito ini

teman saya sejak di Komisi VII DPR RI, kemudian kita sama-sama bicara soal asumsi makro ekonomi. Dan saya pernah di Komisi ini memang, saya pernah di Komisi II DPR RI, pernah di Komisi I DPR RI. Jadi saya pernah menikmati itu, jadi mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan kita semua. Jangan sampai ekspektasi itu membuyarkan ternyata Pak Harso tidak seperti yang diharapkan.

Baiklah, tadi sudah disampaikan agenda pada hari ini, tetapi ijin saya juga kalau boleh memperkenalkan teman-teman ini semua yang saya sendiri juga belum hafal. Saya ini belum satu bulan jadi saya kira itu satu PR saya, di sebelah kiri saya ini adalah Sekretaris Kementerian Bapak Himawan, kemudian disebelah beliau itu Bapak Rudi beliau adalah Deputy Regional, kemudian sebelahnya lagi itu adalah Bapak Arifin Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, tapi untuk bosnya untuk RPJMN. Kemudian sebelahnya itu Bapak Kenedy Simanjuntak, yang tadi siang saya diperintah oleh beliau untuk memberikan laporan kepada Presiden sehingga kami terlambat kesini. Sebelahnya Bapak Leonard, beliau adalah Deputy bidang Pendanaan Pembangunan, Bapak Kennedy tadi itu Sarpras, jadi infrastruktur itu di beliau. Kemudian Ibu Vivi Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian paling kanan sendiri Bapak Pungky itu Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan.

Lalu kemudian Bapak Okta ini adalah Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan. Kemudian Bapak Taufik Deputy Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan. Bapak Sugandi beliau bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan. Kemudian Bapak Slamet Sudarsono, tempat dimana saya dulu tukang gergaji yang namanya KE itu Bapak Dito Ganinduto, kita dulu bagian gergajinya, sekarang kita jadi apanya ini, jangan-jangan digergaji. Dan Ibu Diani, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan. Bapak Rizal beliau adalah Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur. Di sebelah saya Bapak Wismono, dan disebelah lagi Bapak Bambang Priambodo beliau adalah Deputy Bidang Ekonomi.

Baiklah, saya kira itu perkenalan saya. Dan mungkin saya akan langsung saja di evaluasi kinerja. Slide nomor 7, saya mungkin tidak perlu memperkenalkan lagi Bappenas peranannya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman yang baru bergabung di Komisi XI DPR RI saya kira *fast learner* semua, pasti cepat sekali, karena Anggota DPR RI adalah super generalis, luar biasa, ini universitas terbaik di dunia.

Capaian akuntabilitas kinerja untuk Bappenas, *alhamdulillah* sejak tahun 2008 hingga 2018 itu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sejak tahun 2008 hingga 2018, mudah-mudahan tahun 2019 juga WTP. Kemudian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah juga kami sekarang pada peringkat A dengan angka 80. Kemudian tingkat maturitas sistem pengendalian internal naik ke level 3, kemudian untuk reformasi birokrasi dari BB menjadi A. Sehingga kehadiran saya begitu enteng, tapi berat juga bagaimana untuk mempertahankan itu.

Penyerapan anggaran tahun 2019, kalau saya duduk di tempat saudara-saudara Anggota yang terhormat, pasti banyak sekali pertanyaan saya, tapi tolong saya jangan ditanya. Memang pada bulan Agustus Bapak Bambang Brojonegoro telah mengatakan seharusnya bisa mencapai 40%, akan tetapi pada waktu itu tidak sampai dengan 40% hanya 31%. Tapi kita masih berharap di akhir tahun ini kita mencapai 90% dan posisi hari ini 55% di atas sedikit.

Banyak hal yang bisa dilakukan karena memang pola belanja barang dan jasa yang dibayar di akhir itu cukup signifikan. Dan terutama misalnya persialan untuk Musrenbangnas. Kemudian untuk persiapan RPJMN itu semuanya pada akhir ini karena di mulai pada akhir tahun ini. Dan beberapa hal saya kira anggaran-anggaran yang lain. Dan mudah-mudahan juga saya justru berharap kalau bisa kedepan penyerapan ini bentuknya tidak seperti ini. Bapak Presiden telah menganjurkan kepada semua KL agar performa dari kinerja penyerapan anggaran itu tidak seperti ini dari tahun ke tahun posturnya itu gemuk di belakang. Saya baru hampir 1 bulan disini, jadi maafkan saya ya.

Kemudian yang berikutnya adalah mengenai program perencanaan itu sendiri yang menjadi *main course* tugas dari Kementerian Bappenas ini. terutama tentang mempersiapkan dokumen visi Indonesia 2045 dan visi ini ada 4 pilar disana yang disampaikan dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu pilar pembangunan sumberdaya manusia dan penguasaan IPTEK dan kedua pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, ketahanan nasional dan tata kelola Pemerintahan.

Kita juga sedang mempersiapkan RPJM 2020-2024 yang akan menjadi pegangan semua Kementerian/Lembaga dalam 5 tahun kedepan. Saya bisa menceritakan sedikit disini, kami sedang mohon ada perubahan di dalam proses penyusunan alokasi anggaran terkait dengan seluruh kegiatan, yaitu kalau diijinkan oleh Komisi XI DPR RI selama ini mekanismenya adalah dari Kementerian Keuangan yang memberikan *big and proof*-nya itu kepada KL, sehingga kegiatan-kegiatan itu tidak bisa disatukan, tidak bisa di-*convergen*-kan. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih *supporting to* bukan *related to* atau *main course*. Jadi kalau itu diijinkan dan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden, dan itu mudah-mudahan akan ada perubahan ini. Karena itu, kami telah melakukan stau proses internalisasi dengan Kementerian Keuangan melalui beberapa Direktorat Jenderal.

Yang ketiga, penyusunan RKP tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 61 Tahun 2019. Dan 5 prioritas nasional dengan tema peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas. 5 prioritas itu adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah stabilitas pertahanan dan keamanan.

Berikutnya adalah tentang perencanaan pemindahan ibu kota negara. Ini memang sedang naik daun dan saya kira menjadi pusat perhatian kita semua, bentuk-bentuknya ibu kota negara itu akan seperti apa. Kami yang

mngkoordinasikan semua langkah untuk mewujudkan pemindahan ibu kota negara yang baru itu. Satu mainstone yang mesti kami capai pada akhir tahun ini adalah terbentuknya badan otorita, tetapi memang ada bagian pekerjaan itu yang belum bisa kami selesaikan karena terkait dengan otoritas di KL lainnya, yait proses deniasi dari 180 ribu hektar yang dinyatakan sebagai daerah ibu kota negara yang baru.

Kemudian yang kelima, ada Indonesia Development Forum. Dalam Indonesia Development Forum ini telah dilaksanakan 3 kali dengan tema yang beragam. Tahun 2017 memerangi ketimpangan untuk pertumbuhan yang lebih baik, dan kita lihat juga ratio gini kita juga membaik. Kemudian tahun 2018, terobosan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah di seluruh nusantara. Dan yang terakhir tahun2 019 yang bertemakan *mission imposible*, memanfaatkan peluang pekerjaan masa depan untuk mendorong pertumbuhan yang *inclusive*.

Yang berikutnya adalah *sustainable developmebt goas*. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia pada tahun 2009 dan 2011 yang lalu kita tidak bisa mencapai *millennium development goals* dan beberapa dari itu di-*carry over* ke SDG's dan SDG's juga menjadi kesepakatan internasional. Dan ini juga salah satu *main course* yang dilakukan di Bappenas.

Berikutnya adalah model inovasi pembangunan dalam hal ini terutama yang menjadi sorotan adalah soal stunting. Stunting menarik sekali karena banyak orang yang tidak mengerti stunting. Stunting itu dianggap kerdil, dianggap pendek, berarti saya ini juga korban stunting. Jangan-jangan Bapak Habibie korban stunting, jangan-jangan yang terhormat Bapak Andreas juga korban stunting. Ternyata bukan itu stunting, stunting itu adalah kehilangan *golden time*, masa yang paling penting bagi seorang anak manusia sampai pada usia 2 tahun, yaitu asupan energi dan gizi yang tepat dalam hal ini adalah protein. Protein yang dimaksud disini adalah protein hewani dan sebagian besar itu memang diharapkan didapatkan dari susu. Yang mendekati itu adalah ASI, karenanya kalau tidak mendapatkan ASI create-lah apa yang disebut dengan makanan pendamping ASI. ASI ini saya kira kalau agama saya mengatakan seorang anak manusia itu harus melekat dengan ibunya selama 30 bulan lamanya dan 30 bulan artinya 2,5 tahun. Jadi memang itu ternyata penting sekali stunting. Dan Indonesia sekarang masih di atas 20% sekitar 27% pad atahun 2024 kita akan menurunkan sampai di bawah angka 20%. Artinya dari 100 bayi dari umur 2 tahun kita harapkan masih 20% yang stunting, sedangkan di negara-negara lain itu sudah di bawah 10%, ada yang cuma 6 atau 4/100 kelahiran.

Yang berikutnya adalah kajian strategis. Kajian strategis ini banyak yang kita lakukan analisis perkembangan ekonomi dan keuangan Indonesia dan global, finances dampak ekonomi dampak pemindahan ibu kota negara, analisis pola konsumsi masyarakat terhadap penyelenggaraan ASEAN Games, perkembangan inflasi bulanan, pemutakhiran data indeks pembangunan ekonomi inclusive, baik di tingkat nasional, provinsi kabupaten kota. Saya kira kalau analisis perkembangan ekonomi dan keuangan Indonesia dan global saya kira itu adalah menu sehari-hari di Komisi ini, jadi tidak perlu kami jelaskan lebih detail dan ada saatnya nanti itu waktu dipimpin oleh Bapak Muhidin Said Abdullah nanti, ada waktunya kia berdebat soal itu.

Yang kesembilan adalah Desk Papua dan Papua Barat. Dan dalam hal ini koordinasi perencanaan dan penganggaran Kementerian diantaranya untuk pelayanan kesehatan jarak jauh, penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama, pendidikan vokasi, pengembangan produksi komunitas ekonomi lokal, karena di sana banyak misalnya sagu sampai vanili, ada kopi, ada kakao, dan yang populer dari Papua adalah buah merah. Kemudian penuntasan pembangunan jalan trans Papua.

Desk Aceh ini juga dalam rangka, sebenarnya kedua Desk ini disiapkan untuk karena sebentar lagi yang namanya Dana Otonomi Khusus itu selesai tahun 2021 di Papua dan kemudian akan disusul dengan Aceh. Jadi mereka sendiri bersiap-siap kekhawatiran mereka untuk begitu hilang dengan dana Otsus yang cukup besar itu. Jadi ada cara mereka semacam ini exit strategy yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka itu. Yang kesebelas adalah committee nasional keuangan Syariah. Ini terus diupayakan untuk penguatan sektor di bidang ekonomi Syariah termasuk penguatan mengenai halal, sektor keuangan, sektor usaha mikro dan kecil dan menengah termasuk ekonomi digital utamanya di bidang perdagangan.

Berikutnya adalah alokasi dan integrasi sumber pendanaan pembangunan. Tentu disini pertama adalah penyusunan pagu indikatif dan pagu anggaran RKP tahun 2020 nanti bersama-sama Bapak Said Abdullah sayang tidak hadir hari ini, padahal saya ingin mengingat beliau nanti jangan kejam-kejam sama kami.

Kemudian yang kedua adalah karena kita sama-sama tahu kan Bapak Dito yang terhormat. Kemudian merger project itu tentu terbuka dan saya ingat sekali kalau hal-hal seperti ini ketika saya pada posisi Anggota Dewan saya berharap merger project itu dibuka dan dapat diakses oleh siapa pun. Dan karena ini menjadi perhatian seluruh umat, jadi saya pikir nanti saya akan buka juga itu bagaimana merger project itu bisa dikenal. Tentu kemudian kita mencoba mencari pola-pola pembiayaan alternative, kita juga mengefisienkan atau kalau bisa mengurangi perencanaan pinjaman luar negeri dan kalau bisa kita arahkan menjadi PDN (Pembiayaan Dalam Negeri) atau pinjaman dalam negeri.

Perencanaan pemanfaatan surat berharga Syariah negara ini sedang kami dorong termasuk bekerja sama dengan Bapak Anggito Abimanyu badan yang dipimpin oleh Bapak Anggito, BPKH. Sistem dan prosedur pendanaan pembangunan, integrasi, sistem perencanaan RPJMN, RKP, Renja, DAK dan Musrenbang melalui Krisna. Kami punya sistem aplikasi Krisna dan Krisna ini saya sudah tes kemarin canggih sekali. Jadi ini terutama untuk Bapak Misbakhun ini. Jadi saya mau ingatkan jangan macam-macam.

Krisna ini sistem aplikasi yang bisa melihat mulai dari bentuk besarnya itu sampai dengan MAK (Mata Anggaran Kegiatan). Saya sebenarnya dulu menolak kalau DPR RI itu tidak boleh sampai di satuan 3. Tetapi saya ingin membuktikan bahwa ketika DPR RI tidak hadir ini yang terjadi. Jadi ketika saya coba disana, saya tidak perlu sebut lokasinya, namanya program stunting saya *zoom* sampai akhirnya saya suruh baca apa itu kemarin kita baca, ternyata memperbaiki pagar Puskesmas, itu stunting. Ada lagi harmonisasi, itu hal yang saya kira perlu dikurangi dan bahkan

dinihilkan hal-hal yang seperti ini. Saya cuma mau ingatkan ternyata Pak Misbakhun benar, itu maksudnya Bapak Misbakhun.

Yang berikutnya adalah evaluasi kinerja pembangunan. Itu melakukan monitoring dan melibatkan seluruh KL dengan memanfaatkan Krisna tadi. sebenarnya Krisna ini ingin disandingkan sama Sakti, Sakti itu Kementerian Keuangan punya. Kalau itu bisa di-*interoperability* itu bagus sekali kalau bisa seperti itu. Tapi di Kementerian Keuangan juga cukup kuat mungkin bisa dijahit di Komisi XI DPR RI. Jadi tugasnya Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang terhormat.

Berikutnya adalah penguatan kemampuan perencanaan daerah. Dan saya kira itu saya, kemudian mengenai dukungan manajemen. Kami juga ingin sampaikan bahwa sebentar lagi mungkin 1 bulan atau 2 bulan kedepan kami akan pindah ke Jalan Rasuna karena Gedung yang saya tempati itu ternyata sudah masuk katagori heritage yang tidak boleh dibuat perkantoran oleh Jakarta. Jadi itu harus kita ikuti peraturan yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kemudian pembangunan jaringan infrastruktur, yang sedang dikerjakan.

Kalau boleh saya teruskan saya akan teruskan mengenai untuk rencana kerja tahun 2020. 5 menit saja saya bisa sampaikan, saya kira pertama program perencanaan pembangunan nasional dalam penyusunan atau perencanaan yang akan datang ini tahap-tahapnya adalah siklus yang umum yang sudah sering saya kira disampaikan. Dan saya kira tidak saya mau lewati saja ini, tetapi yang pertama adalah kami akan menyiapkan regulasi dan kerangka kebijakan tentang ibu kota negara. Kemudian penyiapan kelembagaan ibu kota negara, perencanaan ibu kota negara, itu yang terkait dengan ibu kota negara. Kemudian mengenai program perencanaan pembangunan nasional itu sendiri. Meliputi penganggaran, pengendalian, kemudian penguatan fungsi pemampu dan sebagainya.

Saya mau langsung saja ke slide 23 itu jauh lebih menarik daripada saya jelaskan itu. Yang kedepan alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas yang sudah diketok saya kira ini, karena ini masuk di dalam APBN 2020. Itu terdiri dari program utama 51,43% dan yang sifatnya program pendukung 48,57%, yaitu program utama nilainya sekitar 948,43 miliar dan program pendukung yang terdiri dari pelayanan dukungan, manajemen, pelayanan pengadaan sarana dan prasarana dan pelayanan pengawasan internal, total semuanya adalah 880 miliar.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, karena saya hanya diberikan waktu tadi 20 menit oleh Ketua.

Terima kasih.

*Billahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Kenalan dulu Bapak Hafisz.

F-PAN (Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat datang Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas yang baru.

Baru tapi stok lama, kalau saya pensiunan juga Pak, dari meja Pimpinan tapi *insya allah* masih mengawal di Komisi XI DPR RI. Hanya satu yang berubah Pak, saya hanya nomornya saja A-487. Kalau Dapil masih sama Palembang, Fraksi masih sama, kemudian juga istri masih sama.

Saya kira itu, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas yang telah memberikan pemaparannya. Baiklah selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Anggota Komisi XI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan, pendalaman dari hal-hal yang telah disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Di sini di meja Pimpinan sudah ada 10 penanya, mungkin dari sebelah kiri dulu Bapak Muhidin Said silakan.

F-PG (H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri yang saya hormati dan seluruh jajarannya.

Jadi pertanyaan saya ringan-ringan Pak, saya tertarik kemarin paparan Menteri Keuangan menyangkut masalah kordinasi. Jadi kalau ini, kalau saya lihat ini hampir setiap kementerian bahkan di daerah juga begitu, ini tentu harus kita cari solusinya. Dan saya yakin Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas ini pasti mampu. Jadi hampir semua kegiatan-kegiatan kita ini sering terlambat karena kurangnya kordinasi. Ini saya kira yang harus kita cari solusinya, karena Bapak Presiden selalu mengingatkan bekerja-bekerja dan bekerja. Nah, ini persoalannya kalau tidak ada kordinasi bekerja yang bagaimana ini. Dan saya yakin beliau menempatkan Bapak selaku Kepala Bappenas saya yakin mampu melakukan mencairkan jalan keluar bagaimana menyelesaikan ini.

Contoh soal dari sisi serapan anggaran dari target-target yang setiap tahunnya kita dapatkan bahwa pada akhir tahun anggaran itu terjadi penunpukan pelelangan dan lain-lain, penumpukan pencairan dan lain-lain. Dan ini biasanya menimbulkan hal-hal yang kurang baik di kalangan aparat bahkan dari para pelaku-pelaku usaha itu sendiri.

Oleh karena itu, kalau ini kita tidak mencarikan jalan keluar ini agak repot. Termasuk seperti DAU, DAK, ini kemarin Menteri Keuangan bagaimana cara penyelesaiannya. Saya kira ini Bapak Menteri ini masalah DAK dan DAU ini memang agak sulit kita kontrol karena inikan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, namun itu dananya dari pusat, tetapi penggunaannya sudah masuk pendapatan daerah, dan dialokasikan melalui APBD daerah. Ini jadi problem kalau saya lihat di tiap-tiap daerah, sehingga sasaran daripada DAU dan DAK ini kadangkala tidak sesuai dengan harapan kita untuk membangun daerah-daerah. Termasuk juga dana desa Pak, ini sangat anu sekali.

Saya harapkan Bapak Menteri mampu mencarikan solusi bagaimana mensiasati ini, sehingga kita ada peran baik pusat maupun DPR RI itu melakukan pengawasan secara intensif sehingga sasaran yang diinginkan untuk mempercepat proses pembangunan daerah ini bisa kita capai. Kalau ini tidak Pak, dana desa kita sudah 73 triliun tahun ini dan ini sangat luar biasa selali. Apa yang terjadi? Banyak sekali Kepala Deas masuk perangkat hukum. Ini kalau kita tidak ikut bersama-sama kebetulan saya kan lama di Komisi V DPR RI Pak, jadi ini saya khawatir yang begini ini.

Jadi oleh karena itu, saya kira dengan Bapak Menteri kita yang sekarang ini Bapak Suharso jadi Menteri PPN/Kepala Bappenas ini saya yakin mampu mencarikan solusi ini. Kemarin Bapak Presiden saya lihat di running text muncul lagi masih sangat kecewa karena masih ada kegiatan-kegiatan yang baru tender, bagaimana baru tender sekarang ini. Nah, ini dimana letak permasalahannya ini, inikan menyangkut koordinasi semua. Inilah barangkali PR buat kita semua untuk kedepan ini supaya kita bisa lebih baik untuk mencapai sasaran menghadapi tahun-tahun Indonesia maju. Saya kira ini yang penting sekali Bapak Menteri.

Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan selanjutnya yang terhormat Bapak Misbakhun, siap-siap Bapak Sihar Sitorus.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih Bapak Ketua.

**Pimpinan Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajarannya yang saya hormati.**

Pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu Pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua,

Om swasti astu,

Namo budaya.

Saya kalau lihat paparannya Bapak ini dalam beberapa minggu inikan kita paparan sama hampir semua mitra Kerja Komisi XI DPR RI. Ini sangat nasionalisme Pak, kita lihat paparan Menteri Keuangan bicaranya pertama langsung ekonomi global Indonesia mendekati krisis, tadi sama LPS sama, semuanya berbicara seperti itu Pak.

Nah, yang merencanakan perencanaan pembangunan nasional bicaranya sangat nasionalis. Hari ini saya lihat paparan Bapak hal-hal seperti itu dikembalikan kepada domain nasional kita. Saya ingin meminta tolong kepada Bapak Menteri Pak, saya tidak mengerti sama Bapak. Ini tolong menterinya diingatkan yang membua perencanaan pembangunan nasional saja tidak merencanakan hal yang aneh-aneh misalnya Indonesia masuk krisis, Indonesia dalam menghadapi resesi, dan sebagainya. Ini kita semua Pak, ditakut-takuti, paparan IMF prediksi globalnya menurun, world bank prediksi globalnya menurun, regional begini, ada trade war dan sebagainya, yang perang siapa kita suruh menerima resikonya.

Nah, ini yang perlu saya ingatkan Pak, karena Bapak inikan ilmunya sudah sangat tinggi Pak. Karena kalau rapat di kabinet saya lihat foto-fotonya itu di media online itukan sebelah Bapak inikan yang suka cerita nakut-nakuti kita semua ini Pak. Nah, tolong diingatkan Pak, karena apa? Bapaklah yang merencanakan pembangunan nasional ini, apalagi Bapak yang menyusun visi Indonesia 2045.

Nah, kalau saya lihat ini paparan ini jelas-jelas menunjukkan identitas kita sebagai sebuah bangsa yang mandiri, berdaulat dan merdeka Pak. Saya melihat kalau dari profile yang Bapak tampilkan saya percaya dengan apa fugur-figur yang ada di Bappenas Pak. Saya tidak kaget Pak, kalau sejak tahun 2008-2018 WTP saya tidak kaget kalau Bappenas, karena disanalah kalau bicara SDM unggul ya Bappenas yang mulai, karena yang merencanakan mereka semua.

Inilah tingteng nasional kita, berbicara dalam sebuah perspektif kepentingan nasional kita dalam merencanakan. Tetapi kita ini masalahnya Pak, kita ini sama yang menyusun APBN di takut-takuti soal krisis itu terus Pak. Yang bisa menertibkan inikan Bapak, yang bisa menertibkan orang yang menakut-nakuti hanya Bapak, tolong diingatkan Pak, supaya kita ini tidak gemeteran menghadapi krisis Pak. Sudah begitu dipakai apa, pakai tadi kayak motong anggaran Bapak dari 3 triliun jadi 1,8 triliun. Kita menghadapi ini Anggota DPR RI dari 6 triliun jadi 4 triliun, karena apa? tidak tahu untuk apa.

Ini Pak, dalam konteks penyusunan RPJMN dan sebagainya tolong dikembalikan Pak. Kekuatan kelembagaan Bappenas ini dalam menyusun anggaran, dalam proses triparted itu Pak. Karena apa? Kementerian Keuangan ini merasa dia sebagai bendahara umum negara, punya kewenangan mengalokasikan,

dia sering menggunakan ini sebagai sebuah posisi burgening politik terhadap lembaga manapun dan ini harus ditertibkan Pak.

Itu bukan uangnya Kementerian Keuangan, itu uangnya rakyat yang kewenangan kelembagaannya ada di Kementerian Keuangan. Yang bisa menertibkan ini saya yakin Bapak tidak ada yang lain. Kalau perlu Pak, kita mau revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ini, kita geser kembali saja kewenangannya, penyusunannya dan sebagainya Bappenas dengan side yang hampir seimbang dengan Kementerian Keuangan.

Kalau tadi Bapak menyampaikan ada kewenangan yang seperti ini, kita geser kembali saja. Supaya apa? kesewenangan-kesewenangan itu tidak terjadi Pak. Nah, ini kalau menurut saya menertibkan ini, maaf saya bukan maksudnya Bapak jadi Satpol PP, tidak. Tapi mendisiplinkan Anggota Kabinet ini pada sebuah perencanaan pembangunan nasional Pak. Loh Pak, kita punya Menteri Keuangan terbaik di dunia, masa pertumbuhan hanya cuma 5%, tax rasionya tidak sampai 10%.

Nah, inilah kalau menurut saya yang harus kemudian kita berbicara dalam sebuah detail permasalahan yang bisa mendeteksi sejak awal, jalan keluarnya apa, dengan kekuatan dan sumber daya yang kita miliki, kita menguatkan itu apa resultansinya untuk result-nya untuk program-program yang sudah kita rencanakan.

Terus berikutnya, soal Gedung Bappenas Pak. Saya ini mau sedikit cerita Pak, saya tidak tahu mudah-mudahan bisa diwujudkan sekarang Pak. Itu Gedung punyanya Bappenas, saya sudah bantuin Bapak Bambang Brodjo itu kurang setengah apa, itu setengah mati kirim surat ke Kementerian Keuangan untuk ngambil alih Gedung ini tidak bisa Pak, Menteri Keuangan maunya tetap nyewa saja, padahal itu Gedung bisa diambil dan dianggarkan sudah. Mau dibayar kompensasi, saya cerita salah satu BOT yang bagus itu adalah Menara yang sekarang dipakai oleh Dirjen Imigrasi, itu dulu punyanya tanahnya Pemerintah di BOT kemudian jadi swasta dan kemudian waktunya habis dikompensasi oleh Pemerintah. Kualitasnya bagus, lokasinya primer, dan kemudian jadi Gedung Pemerintah. Dan itukan menunjukkan bahwa Pemerintah itu layak mempunyai Gedung yang kualitasnya bagus, di daerah primer dan sebagainya. Bappenas ya tadi yang Bapak sampaikan, ini bertahun-tahun saya tidak tahu ada masalah pribadi antara Menteri Bappenas yang lama dengan yang Menteri Keuangan. Yang seperti inikan persoalan pribadi kan tidak boleh dibawa menjadi persoalan kedinasan. Karena apa? inikan bukan persoalan pribadi antar figure-figur Menteri yang ada.

Nah, inilah kalau menurut saya tolong di-*clear*-kan Pak, dikembalikan swasta yang membangun diberikan kompensasi yang memadai dan ini bisa jalan. Sehingga apa Pak? pekerjaan-pekerjaan yang butuh fasilitas memadai bagi Bappenas ini bisa berjalan dengan baik. Kalau tugas-tugas yang lain silakan nanti ditugaskan kepada kita, kita siap untuk melaksanakan Pak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Sihar minta ijin dulu ini Ibu Vera mau duluan karena dipanggil sama Bapak SBY.

Silakan Ibu Vera.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan.

Singkat saja bahwa kita tahu semua bahwa kelihatan ini memang Bappenas ini seperti so simple, karena dia cuma ada kantornya di Jakarta. Forto folio-nya memang di pusat, tapi ini luar biasa, jangan main-main Bappenas ini luar biasa dia biasa karena dia tintong dari pembangunan Indonesia keseluruhan mulai dari pertahanan, TNI/Polri, mulai dari Pilkada, sampai mengenai semua ada disini. Kalau kita ini biasanya Bappenas suka tawaf dari Komisi I DPR RI sampai dengan Komisi XI DPR RI, akhirnya nanti di Komisi XI DPR RI pembahasan ketika RKAKL.

Jadi kita anggap ini tidak bisa kita bahas untuk sekarang ini, ini cuma pengenalan evaluasi kinerja internal. Saya ingin ada satu sesi khusus jadi setiap deputi mungkin memaparkan program-program yang ada di Poksinya masing-masing. Misalnya begini, saya ingin mendengar visi dan misi Presiden Jokowi itukan turunannya harus dilaksanakan oleh Bappenas. Ini mau kemana 2020, Indonesia maju iya saya tahu tetapi yang secara jelas itu saya tidak melihat di dalam pemaparan Bapak ini mungkin hanya exercise saja pengenalan pertama. Tapi saya perlu pendalaman yang cukup, kalau dulu jaman dengan Bapak Pasca ataupun dengan Menteri Sri Mulyani pada saat itu kira rapat dengan Bappenas tidak bisa satu jam atau dua jam. Memang betul Bapak Menteri tidak usah lama-lama cukup diwakilan dengan Deputinya saja, karena itulah sektor pendalaman. Ketika kita mendengarkan visi dan misi Presiden disitulah kita membuka semua apa yang akan dilaksanakan. Di daerah mana program mengenai pengembangan sustainable development goal's apakah cuma hanya di daerah-daerah tertentu di tingkat provinsi, itu juga saya harus dengar.

Padahal SDG's ini bukan ranahnya Komisi XI DPR RI tapi Komisi IX DPR RI. Tapi kita ini sebetulnya luar biasa dengan mitra kerja Bappenas master plan blue print Indonesia itu ada disini, ini Kementerian yang cukup seksi. Ini serius, luar biasa, Bapak-bapak yang ada disini Profesor, Dokter, luar biasa, kita-kita ini kalah kalau untuk dibandingkan, karena mereka semua punya ini yang kita tidak tahu.

Jadi saya minta Pimpinan pendalaman nanti dengan para deputinya, menterinya mungkin hanya pembuka pada siang hari ini, karena memang tidak cukup untuk satu atau dua jam kita membahas lebih dalam. Apalagi dalam rencana kerja 20320 itu saya ingin mendapatkan program yang sangat komprehensif dari mitra Komisi XI DPR RI memang domain dari Komisi XI DPR RI akan tetapi kita ini adalah Komisi Bappenas. Karena disitulah bisa terlihat nomenklatur dimana ini cantolannya, kalau kita Cuma ngomong perencanaan pembangunan nasional atau kinerja didalam sektor internalnya itu tidak bisa terlihat.

Jadi saya mohon Bapak Suharso, nanti mungkin perlu ada pertemuan berikutnya karena isinya menarik. Saya paling cukup semangat kalau rapat dengan Bappenas, karena ini kalau kita bilang ini kita sudah Doktor kalau rapat dengan Bappenas, semua ada disini barangnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Vera.

Yang terhormat Bapak Sihar Sitorus.

Silakan Pak.

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Terima kasih Pimpinan.

Selamat siang Bapak Menteri dan jajarannya.

Jadi alur-alur ceritanya ini nyambung ini terima kasih Ibu Vera sudah nanya duluan, jadi saya masuknya lebih enak. Dari Daerah Pemihan saya Pak, ini ada yang ajaib, jadi slide 10 point 3 dimana dikatakan tentang 5 prioritas nasional pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, nilai tambah sektor riil, ketahanan pangan, stabilitas ketahanan dan keamanan itu ada di satu pulau terluar, termiskin dan terbelakang, yaitu Pulau Nias. Memang dia masuk dalam Provinsi Sumatera Utara, tetapi apabila kita melihat problem yang kita hadapi secara nasional Kepulauan Nias ini perlu ada satu desk khusus sebagai tambahan dari desk Papua dan desk Aceh. Secara IPM juga dia rendah, mungkin salah satu terendah di Republik ini dari stunting, stuntingnya juga sangat tinggi. Jadi kalau kita gunakan 5 prioritas nasional sebagai parameter, maka semuanya akan masuk Kepulauan Nias.

Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, kembali lagi di halaman 11 point 5 skema 2019. Ini sangat menarik karena kita masih ingat Bapak Presiden mengingatkan tentang revolusi industry 4.0 dan kita akan masuk di revolusi industry 4.0 tentang *character building*. Salah satu resiko dari revolusi ini 4.0 adalah kehilangan lapangan pekerjaan tradisional yang akan digantikan oleh otomation. Sementara tema 2019 kita memanfaatkan peluang pekerjaan masa depan yang mana sebagian daripada itu hilang. Jadi mungkin perlu ada study khusus dari Bappenas untuk mengantisipasi kehilangan lapangan pekerjaan tapi di saat bersamaan kita juga menginginkan lapangan pekerjaan yang banyak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Yang ketiga Pak, mungkin saya sedikit ingin bertanya tentang efektifitas pola kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau *public private partnership*.

Seperti apa sih efektifitasnya apakah ini akan terus kita gunakan sebagai model untuk dalam pembangunan 2020 dan seterusnya.

Itu saja dari saya Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya Bapak Didi Irawadi, silakan.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Mohon ijin Pimpinan, ini minta duluan karena sama dengan Ibu Vera ada rapat dengan Ketum juga.

Terima kasih.

**Yang terhormat Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas dan seluruh jajaran,
Yang terhormat Pimpinan dan para rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI.**

Menarik terima kasih Bapak Menteri, apa yang dipaparkan saya rasa sangat menarik apalagi harus kita akui bahwa Bappenas ini menjadi tank Pemerintah. Banyak hal-hal yang dipaparkan tentu tidak cukup dalam satu hari kita untuk mengkaji semua.

Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyoroti satu hal agenda besar yang akan dilakukan mungkin dalam 5 tahun ini, terkait yang tadi sudah saya singgung rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Saya rasa ini pekerjaan besar yang luar biasa dan ini merupakan program yang sudah lama dari Jaman Presiden Soekarno, lalu Presiden Soeharto, dan Presiden berikutnya, namun baru kali ini secara tegas dan serius akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya rasa ini adalah ide yang luar biasa, ide yang mulia yang ingin filosofinya bagaimana pemerataan pembangunan.

Namun tentunya ide yang mulia ini persoalannya adalah apakah *timing*-nya tepat. Inikan kalau tidak salah kemarin itu diupayakan pemindahan awal itu bisa 2024 mungkin kalangan eksekutif dulu. Nah, ini saya kira ini harus ada pengkajian yang lebih jauh dan dalam lagi Pak. Dan saya dengar tadi akan dibentuk badan otoritas pemindahan Ibu Kota dan ini tentu akan berkaitan erat sekali dengan peran Bappenas ini.

Jadi yang menjadi persoalan adalah apakah *timing*-nya tepat disaat kalau dikaitkan dengan apa yang dipaparkan kawan-kawan sebelumnya apakah situasi ekonomi saat ini sudah bisa menunjang manakala itu harus dalam waktu 5 tahun kedepan, apalagi kemarin Menteri Keuangan dan banyak pihak ini potensi resesi akibat situasi ekonomi global inikan mengancam kita kedepamn, berarti ini akan mengganggu program ini juga, walaupun ini perencanaan yang baik tapi masih banyak hal lain yang saya kira yang harusnya menjadi prioritas saat ini mengingat

kesenjangan ekonomi dalam pembangunan yang masih bermasalah tadi Bapak sebut persoalan stunting itu bukan persoalan yang biasa-biasa saja Pak.

Jadi persoalannya menurut hemat saya apakah timing-nya tepat. Mungkin kalau pemindahan Ibu Kota diprediksi saya lebih dari 10 tahun ke depan katakan 20 tahun lagi mungkin akan tepat, karena mungkin saat itu situasi ekonomi dan keuangan negara kita akan sudah lebih baik harapannya. Apalagi kalau kita dengar untuk awal saja diperlukan dana kurang lebih 400 triliun. Dan kami pernah mencoba mengkaji sampai dengan pemindahan sempurna itu pasti 8000 triliun Pak, dana yang akan dialokasikan.

Juga dari persoalan pertahanan dan keamanan ini Pak, ini harus jadi pemikiran kita juga. Sebagaimana ada suatu di dalam militer itu musuh yang paling berbahaya itu adalah tetangga terdekat kita. Kita jangan lupa sejarah pada Dwikora dulu kita tidak menang itu. Dwikora 1965 itu kita kalah, tetapi karena diplomasi luar biasa akhirnya Indonesia lepas dari kemelut itu pada saat Pemerintahan Soeharto, padahal kalau kita harus pindah Ibu Kota segi pertahanan dan keamanan jadi harus membangun pangkalan-pangkalan militer yang kuat di sekitar Kalimantan Timur atau Penajam Utara kalau saya tidak salah. Sementara Jakarta ini sudah dikonsepsi luar biasa dari sisi pertahanan. Jakarta ini kalau lihat pangkalan militer itu ada di Bandung, ada di Madiun, Palembang juga, di Makassar dan sebagainya sehingga sangat kuat menghadapi kemungkinan. Kita tidak mengharapkan perang tapi perang siapa yang bisa memprediksi. Nah, ini sisi peranan pertahanan dan keamanan menjadi permasalahan.

Lalu juga disana di tempat Ibu Kota baru itu ada tanah-tanah konglomerat tertentu. Apakah itu akan dengan mudah memberikan konsultasi yang namanya pengusaha tidak ada yang segalanya bisa mudah. Ini harus diperhitungkan juga, apakah aset-aset yang ada di Jakarta harus ditukar gulung. Bagaimana perhitungan dan sebagainya ini kompleks sekali saya kira ya, bukan persoalan yang mudah kedepan.

Lalu teori kalau Ibu Kota Negara itu harus berada di sentral suatu negara, apakah selalu mensejahterakan. Saya rasa dalam situasi banyak contoh tidak terlalu Ibu Kota itu harus ada di tengah suatu negara. Sebagai contoh begini Pak, negara Amerika Serikat Ibu Kota Washington DC itu berada di ujung timur Amerika, Amerika Serikat ini 220 tahun kurang lebih kira-kira. Kalau dia mau pindahkan Ibu Kota saya rasa 100 tahun yang lalu bisa saja pindahkan saja di jantung Amerika di tengah-tengah, tetapi tidak dipindahkan, tetapi negara-negara di ujung California, Washington atau selatan sejahtera semua. Jadi kesejahteraan itu tidak selalu identik bahwa Ibu Kota harus berada di tengah suatu negara. Jadi teori harus di tengah itu tidak selalu relevan. Dan kita juga harus belajar ternyata tidak semua pemindahan ibu kota itu sukses, Brazilia saja padahal ini negara kontinen, kita lebih kompleks kita adalah negara kepulauan dengan 17 ribu pulau lebih. Kalau kita lihat Brazilia tidak sukses. Canberra di Australia tidak juga sukses, apalagi contoh yang lebih buruk ada Myanmar itu suatu kegagalan. Tapi kalau Myanmar mungkin lebih karena birokrasi yang korup karena pemindahan inikan lebih banyak jual beli dan sebagainya.

Nah, point saya bahwa persoalan ini bukan kami tidak setuju, kami Partai Demokrat juga mengadakan pengkajian. Tetapi *timing*-nya apakah harus kita karena saya dengar paling tidak 5 tahun kedepan eksekutif dulu baru pindah. Mungkin DPR RI 6 tahun lalu mungkin teman-teman yang ada disini harus pindah ke Penajam Utara, kita siap-siap beli rumah. Jadi persoalan saya *timing*-nya apakah tepat, mohon ini pengkajian yang lebih jauh lagi, lebih dalam. Saya yakin Bappenas dengan kepemimpinan Bapak Suharso yang saya yakin pengalaman politik yang panjang ini akan memikirkan lebih jauh.

Jadi hemat saya, kemarin kita menerima pengkajian dari Kepala Bappenas yang lama. Saya pikir harus ada pengkajian yang lebih jauh lagi, libatkan saya kira kampus-kampus baik di Jawa dan luar Jawa, jangan sampai ini rencana pemindahan kita ingin memakmurkan Indonesia bagian tenfah akibat salah perhitungan di Pulau Jawa gagal jadi tidak juga jadi sejahtera juga, inikan biaya besar, alokasi dananya tidak main-main ini. Ini awal-awal saja sudah ratusan triliun bahkan bisa sampai ribuan triliun mungkin kedepan, kami sempat mengkaji ini.

Oleh karenanya, saya kira mungkin saya tidak panjang-panjang hendak mengingatkan ini jangan tergesa-gesa, jangan terburtu-buru saya kira. Bila perlu ba Pimpinan, kita adakan kemarin kalau tidak salah rencana Pansus Pemindahan Ibu Kota ini dilanjutkan lagi jadi bersama Bappenas, badan otoritas dan DPR RI melakukan pengkajian lebih jauh.

Kita tidak ingin biaya yang sangat besar, ekonomi yang belum menjamin kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Apalagi sekarang ada isu yang sebenarnya jauh lebih kecil dari ibu kota, BPJS saja kita belum sanggup, masalah BPJS negara belum bisa mencari solusi terbaik kita sudah terlalu jauh ingin pindah ibu kota.

Sekali lagi bukan tidak setuju, ini ide besar tetapi rasanya kalau 5 atau 6 tahun lagi kawan-kawan diruangan ini pindah kantornya di Penajam Utara belum waktunya saya kira. Mungkin itu Pak, sekedar saya mengingatkan bagi kita semua bahwa ide yang baik ini harus dengan pemikiran yang matang, terukur dan benar-benar visi dan misi jangka panjang.

Mungkin itu Pimpinan sementara, dan di kemudian hari saya rasa banyak isu lain, tapi karena waktu mungkin sementara mengenai ibu kota dulu. Dan mohon ijin Bapak Menteri, saya pamit karena ada panggilan dari Ketua Umum.

Terima kasih banyak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Bapak Andreas. Tapi waktu kita tentukan sampai jam 17.20 WIB. Cukup ya?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Bapak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Menteri yang terhormat.

Ini sama-sama dari Malang ya Pak, jadi yang pertama adalah memang tahap perkenalan akan tetapi ada baiknya ada semacam juga bintang penuntut. Karena begini, Presiden sudah menyatakan bahwa tidak ada visi dan misi Menteri, tetapi yang ada visi dan misi Presiden. Dan Presiden sudah menyatakan di dalam pidatonya pada saat pelantikan di MPR bahwa salah satunya adalah bagaimana Indonesia nanti di tahun 2045 itu bisa keluar dari *middle income trap*.

Kita tahu Bapak Menteri, bahwa saat ini hampir 5 tahun ini kita kena jebakan satu kutukan pertumbuhan ekonomi 5%, sehingga bagaimana menyambungkan ini. sebetulnya kalau kita ingin keluar dari *middle income trap*, itu pertumbuhan ekonomi di tingkat berapa yang harus kita lakukan. Ini karena kan mau menyusun juga di dalam RPJM 2020 dengan 2024 sebetulnya ini sudah harus kita mulai, karena sekarang ini kalau saya lihat di dalam pembahasan siklus APBN kita bahwa asumsi makro, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya seakan-akan menjadi domainnya Kementerian Keuangan dan dalam hal ini Bank Indonesia hanya memberikan masukan. Bappenas ini sebetulnya malah pembangunannya, berapa tingkat kemiskinan yang akan diturunkan, berapa pengangguran terbuka, padahal harusnya kita kan hole-nya disitu dulu ini. Bagaimana mencapai visi ini, saya kira ini mulai dari awal apalagi kalau kita bicara RPJM 2020-2024 apakah siklus ini akan terus kita lakukan seperti ini. Karena kalau demikian nanti jelas tidak akan nyambung, dan kami mohon pendapat Bapak Menteri.

Berdasarkan kajian kalau kita mau keluar dari *middle income trap* itu pertumbuhan ekonominya itu berapa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Dengan demikian antara perencanaan dengan penganggarannya ini menjadi sinkron. Demikian juga yang menjadi konsen adalah masalah *incremental capital output ratio*. Ini untuk investasi bagaimana kita mau menarik investasi di tengah efisiensi investasi kita yang meninggi. Ini dibandingkan kalau kita dengan Vietnam dan segala macam.

Jadi saya kira dua isu besar yang mari kita duduk di Komisi XI DPR RI untuk mencari hulunya ini minta selesaikan dulu, karena kalau tidak akhirnya tidak akan nyambung. Yang nanti menyusun asumsi makro ekonominya di dalam APBN itu adalah domainnya Kementerian Keuangan, hulunya inikan mestinya dari perencanaan pembangunan. Jadi ini dalam penyusunan RPJM ini saya kira penting untuk kita matangkan.

Kemudian yang kedua, saya hanya tiga saja yang ingin saya fokuskan pada rapat hari ini. Yang kedua, itu bagaimana kita mensinkronkan antara perencanaan pembangunan terutama proyek strategis dengan penganggarannya. Saya kira ini belum sinkron, sebelumnya mungkin catatan di Bappenas waktu itu konsep *money follow the programe*, tetapi pembagian alokasinya masih berdasarkan *function*,

berdasarkan KL. Demikian juga akhirnya proses Musrenbang ini perlu kita cari terobosannya. Karena yang terjadi adalah setiap kita ke daerah kita selalu dapat keluhan. Musrenbang yang bisa dipenuhi di daerah itu tidak sampai 5%, sehingga ada yang sampai tumpukan lebih dari 10 tahun itu juga belum bisa dimasukkan terus tapi belum bisa teralisasi, padahal kita tahu misalkan disana sudah ada jalan tol, tetapi kemudian jalan aksesnya belum bisa dibangun, karena tidak termasuk baik dalam perencanaan Pemda maupun usulan dari desa maupun juga dari Kecamatan sudah ada, tetapi tidak bisa istilahnya itu nyambung, karena yang bisa dipenuhi hanya 5%, kira-kira demikian.

Jadi kami kalau ke daerah itu selalu sepertinya kalau diundang Musrenbang itu hanya seperti ceremonial saja. Kita cuma duduk kemudian ada sambutan dari Gubernur, Bupati akan tetapi kita tidak bisa memperjuangkan apa yang diharapkan oleh daerah tersebut di dalam proses perencanaan pembangunan.

Yang ketiga adalah kami di Baleg itu lagi membahas mengenai *Omnibus Law* Sejujhmana dalam hal ini Kementerian Bappenas juga dilibatkan. Karena kalau dikatakan mau menciptakan lapangan kerja dan investasi itu apa saja sih sebetulnya. Dan tadi kami masih berdebat ternyata banyak hambatan juga ada di daerah. Nah, bagaimana mensinkronkan ini juga, karena kalau yang dibahas hanya di level Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah itu hanya di pusat, di daerah ini ternyata banyak hambatan juga ada di sana. Jadi bagaimana kita membuat *Omnibus Law* itu yang kemudian juga bisa menyelesaikan permasalahan juga dengan peraturan di daerah tersebut. Jadi ini apakah sejauh ini sudah Bappenas dilibatkan, harusnya Bappenas menjadi hulunya dari semua perencanaan pembangunan yang ada.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H.M. AMIR USKARA, M.Kes.):

Terima kasih Bapak Andreas.

Lanjut Bapak Dolfie.

F-PDIP (DOLFIE, O.F.P.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Bapak Menteri.

Mumpung masih baru ini Pak Menteri, sekaligus dalam penyusunan RPJMN 2020-2024. Saya ingin mengusulkan Bapak Menteri ada penajaman-penajaman. Tadi sudah dikatakan Bapak Menteri bahwa Bappenas ingin mengambil inisiatif melakukan reformasi dalam mengalokasikan anggaran. Nah, ini perlu sekali Bapak Menteri apalagi sejak satuan 3 tidak dibahas di DPR RI ada kecenderungan di Kementerian perencanaan menjadi asal-asalan. Karena bisa merubah, memindah-

mindahkan kegiatan di dalam satu program. Ini semakin menunjukkan perencanaan di awalnya itu tidak matang di setiap Kementerian.

Oleh karena itu, ini kesempatan yang baik di dalam penajaman alokasi anggaran di Kementerian/Lembaga. Saya ingin mengusulkan Pak Menteri, agar di setiap Kementerian/Lembaga di tekankan dua indikator. Satu, indikator kinerja tentang anggarannya. Yang saya maksud indikator kinerja anggaran misalnya Kementerian Pendidikan. Indikator kinerja anggarannya adalah berapa sekolah yang dibangun, berapa ruang baru yang dibangun dan sebagainya, itu indikator kinerja penyerapan atau penggunaan anggarannya. Indikator kedua, yang kita perlukan adalah indikator dari dampaknya. Dampak dari pembangunan itu semua apa, apakah benar kemudian wajib belajar 12 tahun tercapai. Jadi ditekankan karena kalau kita lihat di nomenklatur kementerian program itu kan abstrak, program manajemen, program sarana dan prasarana, ada lagi program yang spesifik di kementerian. Itu yang dibahas di DPR RI sekarang ini.

Kalau masing-masing program kita wajibkan ada indikatornya, misalnya di dalam program manajemen aparatur negara. Indikator utamanya sebenarnya di situ adalah pelayanan publik. Apa pelayanan publik yang akan dilakukan di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, di Kementerian, semua kementerian. Itu kan ada itu Pak Menteri, di program dukungan manajemen paling pertama. Seperti Bappenas juga begitu, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Ini semua kementerian ada seperti ini, di wajibkan oleh Bappenas indikator pelayanan publik setiap kementerian output dari program ini apa untuk penajaman.

Yang kedua, formula 20% anggaran pendidikan. Formulasinya dari Kementerian Keuangan, bercampur aduk dengan transfer daerah. Akibatnya fungsi pendidikannya kecil sebenarnya di dalam anggaran 20% itu, lebih banyak kegiatan yang lain. Nah, ini mungkin perlu Bappenas mempertajam formula 20% ini peruntukannya itu seperti apa. Karena kebanyakan sifatnya di transfer ke daerah, transfer daerah melebur dia menjadi penerimaan daerah itu bebas penggunaannya. Tidak hanya dalam fungsi pendidikan, tetapi kepegawaian dan sebagainya itu. Nah, ini mumpung dari awal apalagi periode 2020-2024 itu adalah fokus kepada SDM. Alokasi 20% ini apabila ditajamkan itu sangat signifikan.

Ketiga, terkait dengan pemindahan ibu kota negara. Mungkin sebaiknya Bapak Menteri menyampaikan juga kepada Pemerintah apakah tidak sebaiknya landasan hukumnya dulu yang disiapkan baru hal-hal lain menyusul, supaya tidak muncul perdebatan penting, tidak penting soal momentum waktu, soal yang lain-lain tadi. Inikan selalu menjadi perdebatan apakah waktunya tepat 5 tahun lagi, kenapa tidak 15 tahun lagi, kenapa tidak 20 tahun lagi. Tapi kalau sudah ada landasan hukum semau fokusnya itu searah geraknya, tahapan-tahapannya sudah diatur di dalam landasan hukum itu.

Yang berikutnya, mengenai Musrenbang penajamannya ini Bapak Menteri. Ini pengalaman saya menghadiri Musrenbang di kabupaten, itu lebih konkrit. Anggota Dewan di kabupaten bisa mengusulkan ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, di nasional hanya ceremony-nya saja. Nah, ini mungkin pada Musrenbang yang akan datang agar dipikirkan untuk dapat Anggota Dewan juga memberikan

atau menyampaikan program-program berbasis pada daerahnya. Mungkin tidak open menu Pak, menunya bisa kita ambil dari Musrenbang Provinsi, Musrenbang Kabupaten, jadi tidak open menu juga supaya aspek good governance dan transparansinya terjaga.

Itu saja mungkin Bapak Menteri untuk penajaman kita kedepan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Dolfie.

Bapak Satori silakan.

F-P. NASDEM (SATORI, S.Pdi., M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Seijin Pimpinan Komisi.

Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajarannya.

Pada hari ini saya membaca berita statement yang disampaikan oleh Kementerian PPN/Kepala Bappenas bahwa pembangunan infrastruktur masih jauh dari level dunia, padahal APBN 2019 menitik beratkan salah satunya pembangunan infrastruktur bahkan Pak Presiden Jokowi menargetkan pembangunan jalan tol 4500 sampai dengan 5000 KM. Dilihat dari sudut manakah jauh dari level dunia dan apa tolak ukurnya.

Kemudian yang kedua, mungkin perlu disemangati lagi oleh Pemerintah Pusat berkaitan dengan pembangunan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi, Sumedang, Dawuan) karena ini sangat vital sekali apalagi bandara internasional Jawa Barat sangat kurang begitu bergerak. Padahal Bandara Husein Kartanegara sudah dialihkan untuk penerbangan domestic, kemudian sudah dibantu dengan alat transportasi bis Damri gratis tetapi bandara itu sangat kurang bergerak. Ini jelas salah satunya adalah kurang cepatnya pembangunan jalan tol Cisumdawu. Kalau kita lihat Cisumdawu itu selesai saya yakin akses dari Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat ini sangat cepat sekali untuk menghubungkan penerbangannya itu Pak.

Oleh karena itu, mungkin butuh dari support dari Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan jalan tol Cisumdawu karena kalau kita lihat pembangunannya itu lebih cepat dibanding pembebasan lahannya Pak, karena saya lihat pembebasan lahannya cukup lambat, ada yang karena harganya belum cocok mungkin, sementara ini jalan tol Cisumdawu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan sekali.

Terima kasih Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih teman-teman ada 8 penanya Bapak Menteri. Saya kira kira harus sepakat dulu teman-teman Anggota Komisi XI DPR RI.

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I):

Izin Pimpinan, nambah satu.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I):

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

Bapak Menteri beserta jajarannya.

Melihat tadi terkait dengan model inovasi pembangunan, menarik bahwa hari ini ada isu penurunan stunting yang cukup luar biasa menjadi desain dari Bappenas. Betul, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa stunting ini masa tahun keemasan anak, karena 3 tahun kebelakang ada pergeseran stunting dengan implementasi kegiatan hanya sebatas pola hidup sehat, pemberian gizi, dan juga pembekalan ibu hamil, memberikan biscuit terhadap ibu hamil. Hal-hal ini yang sifatnya sangat mendasar. Itu yang periode kemarin secara implementatif kegiatan dilakukan. Sangat dilihat hanya dari satu sisi.

Nah, mudah-mudahan kedepan nanti Deputy SDM membuat pola yang komprehensif terkait dengan bagaimana mekanisme atau pola penurunan stunting yang memang menyeluruh dalam seluruh aspek. Mungkin ini adalah bagian dari harapan Bappenas mengintegrasikan seluruh kementerian terkait dengan penanganan stunting yang memang menjadi visi Bapak Jokowi sesuai dengan waktu memberikan pidato politiknya.

Yang kedua, terkait dengan tadi disinggung sedikit dana alokasi khusus yang diberikan kepada daerah. Ini keluhan dari daerah, Baped-Bapeda yang ada di daerah sangat kesulitan menentukan titik-titik karena keterbatasan DAK yang digelontorkan ke daerah. Pada akhirnya senantiasa ada arahan konsultasi dari Bappenas. Dan memang hasil konsultasi selalu dalam beberapa pembangunan di tempat itu belum selesai harus diselesaikan. Jadi tidak ada pemerataan pembangunan. Nah, ini perlu ada kira-kira monitoring Bapeda-Bapeda yang

memang itu bisa melakukan pemerataan pembangunan, baik dari segi infrastruktur DAK biar sangat terasa di daerah dalam proses penggunaannya.

Yang ketiga, mungkin tidak tahu ini menanyakan ke Bappenas, apakah ada penjelasan terkait dengan Bappenas ini adalah bagian dari pembangunan untuk konsep OBOR (One Belt One Road) yang memang itu yang meliputi 4 provinsi mungkin nanti berakhir di Bali. Ini yang tidak ada sama sekali tadi jalur sutera maritime yang akan dibangun lewat transportasi di Indonesia dalam rangka menghadapi globalisasi kedepan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Agun.

F-PG (Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Menteri yang saya hormati dengan jajarannya.

Saya ingin menggunakan kesempatan ini yang tentunya bahwa terkait dengan kebijakan penggelontoran dana desa Pak. Saya berharap Pemerintah untuk tidak merubah kebijakan penggelontoran dana ke desa hanya karena faktor yang sering diutarakan di berbagai media. Bahwa seolah-olah dana desa ini tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak mengatasi kemiskinan dan sebagainya dan bahkan diwarnai dengan isu korupsi. Dan yang terakhir perdebatan yang cukup ramai pertanyaan Bapak Menteri PDT dengan Ibu Sri Mulyani yang soal desa fiktif itu.

Kami berharap Menteri Bappenas tidak menarik kebijakan itu, jangan karena hanya kasus tersebut kebijakan tersebut dirubah. Karena secara kuantitatif Pak, permasalahan-permasalahan yang ada itu tidak signifikan jika dibandingkan dengan jumlah seluruh desa yang ada. Jumlah desa itu 76 ribu lebih Pak, yang bermasalah hitungannya hanya puluhan. Begitu pula dengan penyalahgunaan dana yang terjadi itupun hanya terjadi kecil sekali prosentasenya tidak mencapai 3% dari seluruh alokasi yang 73 triliun.

Hal ini menjadi penting kami utarakan karena memang kami mendasarkan pada sebuah argumen yang pertama bahwa demokrasi yang kita bangun ini, ini demokrasi yang masih belum punya format. Dalam buku terakhirnya dia Presiden di University Alabama, dia pimpinan dari sebuah yayasan yang cukup terkenal dan dia menyatakan dengan bukunya dengan judul demokrasi dan liberative dan kekuasaan warga. Kami ingin menggambarkan bahwa sebetulnya masalah utama demokrasi sebagai solusi dari penyelenggaraan Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk

mensejahterakan rakyat ada persoalan itu sendiri, yaitu pada citizen. Citizen inilah yang pada akhirnya tidak peduli, mau demokrasi a, b, c, d tidak peduli yang terpenting saya bisa makan, bisa hidup dan lain sebagainya. Sehingga akibatnya yang terjadi Pak, demokrasi itu menjadi dipersimpangan jalan. Kita bisa lihat kecenderungan orang menulis, semakin hari semakin berkurang partisipasi pemilih sekarang sudah agak naik. Nah, ini yang saya harapkan konsisten Pemerintah terus memberikan dukungan, karena salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintahan hari ini betul-betul pro kepada rakyat, sehingga rakyat terpenggil kembali untuk ikut partisipasi dalam konteks Pemilu. Nah, di dalam kata pengantarnya saya ingin mengatakan bahwa buku ini diterjemahkan oleh para sindikat, yang mengatakan bahwa demokrasi kita di Republik sedang dalam proses ...(suara tidak jelas) Yang sekarang ini membutuhkan kesabaran berpolitik kita, hari ini sedang diuji banyak cobaan. Korupsi yang menggurita, menguatnya gejala konservatif yang anti toleransi dan anti demokrasi.

Oleh karena itu, beliau menyaranaka politik retorika elit harus ditarik membumi menjadi politik kerja warga dengan pelibatan kepedulian setiap orang. Artinya, *government* itu tidak lagi *of the public* tetapi *by the public* Pak, karena sesungguhnya pemilik kedaulatan itu adalah warga, warga itu citizen, citizen itu ada di desa. Nah, ini menurut hemat kami yang harus juga diterapkan jangan sampai kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan kita bergeser dari paradigma-paradigma pembangunan yang hari ini tumbuh berkembang massif di mana-mana.

Contoh kasus beberapa negara yang hancur luluh lantah karena demokrasiya itu jalan sendiri yang mengakibatkan yang namanya *one belt one board* itu yang mengimplikasikan kepada tumbuhnya liberalism, individualism, kapitalisme pasar sehingga yang mampu semakin mampu dan yang lemah semakin lemah. Nah, ini fakta yang sudah terjadi dan bisa kita lihat di beberapa negara Eropa, Yunani, Itali mengalami krisis yang cukup parah. Nah, begitu pula di Amerika Latin, Argentina dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini menurut hemat kami harus menjadi perhatian Bappenas kedepan. Janganlah kebijakan dana desa itu dirubah kembali.

Yang kedua Pak, mohon kiranya juga *government by the public* kita bisa lihat dari kajian kewilayahan. 80% alokasi anggaran itu pemberdayaan masyarakat itu masih berkonsentrasi di Jawa dan Bali. Selebihnya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, apalagi wilayah timur itu bagian yang masih harus terus diberdayakan. Oleh karena itu, penguatan program-program dana desa pun harus sudah ada satu desain yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin di Jawa sudah mulai diberdayakan bagaimana agar masyarakat di desa itu betul-betul menyelenggarakan segala urusannya oleh mereka sendiri, sudah mampu mereka mengelola, karena seluruh infrastruktur fisik maupun non fisik, Jawa dan Bali relative sudah efektif bisa berjalan. Tapi di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Papua infrastruktur itu masih jauh sebagai sarana media transportasi barang dan jasa dan sebagainya.

Oleh karena itu, mungkin penggunaan dana desa pun mesti ada kebijakan yang beragam. Belum tentu Jawa dan luar Jawa itu sama, pasti harus dibedakan. Begitu pula di Jawa sendiri mungkin ada daerah-daerah tertentu yang memang

masih terisolir sehingga mereka masih butuh panduan yang tidak bisa diberdayakan kepada masyarakat begitu saja. Tapi kami yakin di Indonesia bagian timur itu harus ada *direction* yang jelas sehingga penggunaan dana desa itu bisa efektif mencapai tujuan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkesejahteraan.

Saya kira itu catatan dari kami ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Elnino.

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Elnino dari Gorontalo, Fraksi Partai Gerindra.

Bapak Menteri dan jajarannya yang kami hormati.

Inikan karena memang rapat perdana kami memahami ini pasti kita ngomongnya semuanya yang umum-umum, akan banyak hal yang akan kita bahas besok-besok nanti berjumpa, muda-mudahan kalau lancar 5 tahun itu akan banyak membahas banyak hal.

Jadi yang umum-umum ini kira-kira begini dari kami dari Bapak Menteri, bahwa karena ini dalam perencanaan pembangunan nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan, maka tentu rujukan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Membuat rakyat yang merdeka, Bersatu, berdaulat, insya allah bisa adil dan makmur, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Jadi selain ada Undang-Undang Dasar nanti Bapak Menteri ini sudah diingatkan juga semua Menteri kan tidak ada visi dan misi Menteri yang ada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Maka Bapak Menteri juga nanti akan merujuk kepada visi dan misi Presiden, Nawacita dan visi dan misi yang kemarin.

Kita memahami Bapak Menteri ini karena masih baru Bapak Menteri juga benar-benar kementeriannya dengan menyesuaikan banyak hal. Kami juga di DPR RI ada lama dan yang baru sedang ada sinkron dan *tune in*. Mudah-mudahan rapat-rapat kita ke depan akan menghasilkan visi yang sama untuk Indonesia kedepan.

Ada isu besar yang menurut saya oleh Bappenas ini mesti menjadi perhatian yang sangat khusus, yaitu ada kesepakatan di MPR untuk menghidupkan kembali

GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Itukan perencanaan yang sangat panjang dan akan menjadi sangat aneh apabila Bappenas tidak terlibat di dalamnya. Saya kira pemikiran dari Bappenas dengan data-data yang lengkap akan sangat penting untuk menyiapkan GBHN yang dalam versi yang akan dibuat oleh MPR nanti. Jadi itu isu pertama yang besar.

Yang kedua adalah mengenai skema utang Indonesia, ini juga perlu dipikirkan dalam perencanaan. Bukan hanya perencanaan pembangunan tetapi juga merencanakan berapa sih utang atau uang yang kita butuhkan untuk pembangunan itu. Kita menginginkan Bappenas menghindarkan diri dari jebakan yang pernah ditulis tahun 2006 oleh John Perkins, Pak Menteri pasti sudah mengerti soal itu yang ada di buku *confessions of an economic hit man*. Di mana Indonesia beberapa dikerjain oleh badan pengutang luar negeri.

Dan yang ketiga, mengenai ibu kota negara. Saya setuju dengan Bapak Agun dan yang lain-lain bicara tentang dana desa. Ini dunia sudah berubah, Bapak Menteri pasti mengerti birokrasi tidak boleh panjang lagi, mesti pendek. Hanya ada Ibu Kota, kalau perlu hanya Ibu Kota dan Desa. Jadi ini dua entitas yang sangat penting, ibu kota dibangun tetapi desanya juga dibangun itu yang menjadi sangat penting.

Jadi kira-kira itu saja Bapak Menteri, saya memahami ini sudah jam harus selesai, karena Bapak Menteri harus sholat juga.

Terima kasih Bapak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (H. MUSTHOFA):

Izin Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Musthofa.

F-PDIP (H. MUSTHOFA):

Terima kasih atas waktunya Pimpinan.

Barangkali saya hanya mengkonkritkan apa yang disampaikan Bapak Dolfie. 10 tahun kami mengikuti Musrenbangda ini 2 tahun itu hanya diundang untuk menjadi pendengar. Maka saya ingin mengkonkritkan saja kalau berkenan Bapak Menteri, bahwa kami yang ada di masing-masing Dapil diberikan kesempatan untuk kerja sama dengan Bappenas, sehingga nanti pada kesempatan ini apa yang

menjadi peran kami sebagai fasilitator dalam Pemerintah Daerah ini akan benar-benar kita laksanakan dengan baik.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak Menteri mau sholat?

Kita break 5 menit ya Pak.

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Bapak Ketua, kalau Bapak Menterinya sholat kan masih ada deputi-deputinya.

KETUA RAPAT:

Deputi mau sholat silakan sekalian. Masih ada berapa lagi pertanyaa, tanpa Bapak Menteri tidak apa-apa, inikan bisa dicatat juga. Ya sudah dibreak saja ya.

(RAPAT DISKORS)

Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Kita sepakati selesai sampai sebelum Magrib.
Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kami persilakan Ibu Wartiah.

F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, rasanya kalau saya tidak menyampaikan amanah dari masyarakat Lombok Timur nanti saya ditagih. Walaupun Bapak Menteri adalah Ketua DPP kami, tetapi pada forum yang terhormat ini perlu didengarkan oleh yang lain-lain pada tingkat jajaran beliau,

karena ini amanah dari masyarakat Lombok Timur tentang pemekaran wilayah menjadi catatan tersendiri, kami harapkan bahwa Lombok Timur terdiri dari 20 kecamatan, 15 kelurahan dan 239 desa.

Jadi harapan dari masyarakat Lombok Timur sudah lama sekali berproses harapan dari masyarakat Lombok Timur sudah lama sekali berproses agar dimekarkan. Mengingat seperti sepertiga dari penduduk Nusa Tenggara Barat ada di Kabupaten Lombok Timur demi tujuan pemekaran Bapak Menteri bahwa untuk mensejahterakan rakyat kemudian memberikan rasa keadilan dan seterusnya meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola yang baik, sebab satu desa dengan desa lainnya dan satu kecamatan dengan kecamatan lainnya itu jaraknya sangat jauh sekali.

Ini saya pesan yang ingin kami sampaikan, karena mengingat waktu dan sudah banyak yang ditanyakan maupun saran dari teman-teman Komisi XI DPR RI lainnya. Demikian dari kami.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya terakhir Ibu Anis.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ijin Pimpinan, saya ingin menyoroti program perencanaan pembangunan nasional yang nomor 11 tentang KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah). Jadi memang sudah dibentuk dan sudah di-*launching master plan* ekonomi Syariah. Hanya memang dalam pengamatan banyak pihak dan juga termasuk para komunitas ekonomi Syariah, ini kondisi perekonomian Syariah di Indonesia masih jalan di tempat. Dari data OJK ini menyebutkan pangsa pasar syariah itu baru mencapai 8,69% dari total keuangan nasional. Dan ini tentu menjadi perhatian kita semua karena kalau sudah menjadi master plan atau masuk dalam prioritas oleh Bappenas, ini bagaimana bisa mendongkrak, karena harapannya ekonomi Syariah akan bisa menjadi penunjang ekonomi nasional.

Satu yang menjadi penyebabnya disoroti adalah kecilnya permodalan. Modal untuk keuangan Syariah itu sangat kecil, sehingga dengan kecilnya itu dia otomatis tidak bisa tertinggal dalam infrastruktur teknologi. Kemudian layanan jasa keuangan di Indonesia ekonomi Syariah juga sangat lambat dan akibatnya memang kita tertinggal jauh, padahal harapannya itu besar.

Waktu Kementerian Keuangan meluncurkan Sukuk itu kan atensi masyarakat itu sangat besar dan bahkan bisa mereinfrastruktur. Saya termasuk salah satu yang

membeli Sukuk Pemerintah. Sampai di-lounging berapa kali ini artinya bahwa ada keinginan masyarakat untuk ikut serta membangun dengan melalui Syariah, mereka merasa lebih aman meletakkan uangnya disitu.

Jadi mengingat ini adalah salah satu program perencanaan Bappenas dan Kementerian PPN ini mohon untuk lebih menaruh perhatian kepada industry keuangan Syariah, utamanya KNKS sehingga kita bisa melihat ekonomi Syariah ini paling tidak dia bisa menjadi penunjang ekonomi nasional.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, demikianlah tadi pertanyaan dari Anggota Komisi XI DPR RI, dari meja Pimpinan ada.

Silakan Bapak Hatari.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si. /F-P. NASDEM):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas yang saya hormati beserta jajarannya.**

Kira-kira tidak sampai 30 hari lagi kalau termasuk natal ini sudah tanggal berapa. Serapa yang 55% ini diyakini sampai dengan 31 Desember bisa tercapai? Halaman 8. 55,3% sementara waktu tutup tahun anggaran kira-kira 20 hari kedepan. Desember sudah tidak bisa lagi, Natal dan lain-lain, mungkin sudah ada lagi transaksi *guarantee* tercapai Bapak Menteri.

Terima kasih, saya itu saja.

KETUA RAPAT:

Baik, demikianlah tadi pendalaman dan pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas untuk menjawab pertanyaan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Waktu kami persilakan.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Baik, terima kasih.

Pertama saya mengucapkan terima kasih atas semua, baik pertanyaan, pendapat, bahkan saran yang sangat konstruktif terhadap hal-hal yang kami sampaikan tadi, baik yang merupakan wilayah kewenangan kami baik secara langsung atau tidak langsung.

Dari 13 Anggota yang terhormat dan satu dari meja Pimpinan, ada sekitar 34 pertanyaan yang disampaikan. Dan saya lihat itu kalau boleh saya gabungkan itu masuk dalam 10 besar. Ijinkanlah saya menjawabnya secara umum dan pasti akan menyangkut semua isu. Mudah-mudahan kalau tidak mohon saya diingatkan.

Yang pertama adalah terkait dengan kewenangan, kalau saya menyatakan begitu dan fungsi Bappenas yang diharapkan punya peranan yang cukup kuat di dalam perencanaan pembangunan nasional. Saya kira itu tadi pertanyaan yang cukup kuat yang disampaikan kepada kami, mendesain bagaimana rencana pembangunan dan bagaimana sasaran itu mesti tercapai, pilihan-pilihan strategis seperti apa, termasuk misalnya bagaimana *middle income trap* semua orang ingin sekolah di MIT dan mau graduate dari MIT Bapak Andreas, tapi dalam hal ini dari *middle income trap*.

Kewenangan Bappenas menurut pendapat kami adalah seharusnya dan saya kira ini juga kesalahan DPR RI pada jaman saya. Saya mesti mengatakan begitu, ketika dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tapi kita ingat pada waktu itu APBN semasa Orde Baru bahkan Orde Lama, sampai dengan APBN 2003, 2004 malah itu kita mendasarkannya pada Undang-Undang Kolonial. APBN 2005 *alhamdulillah* sudah mulai berdasarkan Undang-Undang yang kita miliki sendiri. Dan saya kira perdebatan itu cukup kuat dan pada saat itulah lupa meletakkan di mana posisi dari Badan Perencanaan Nasional. Saya kira salah satu pokok persoalan di kita, sehingga posisi Bappenas yang harusnya tadi diharapkan startingnya dari Bappenas, sasaran-sasaran terukurnya itu bisa disampaikan oleh Bappenas dan Bappenas berfungsi sebagai *clearance house* perencanaan. Bahkan lebih jauh dari itu Bappenas juga harusnya menjadi istilahnya itu *check point* Untuk setiap perencanaan sehingga semua perencanaan pembangunan nasional itu bersifat konvergen. Sehingga dia mencapai satu titik sasaran yang sama-sama kita harapkan.

Jadi saya bisa mengatakan misalnya kalau kita ada sasaran pembangunan dalam jangka waktu tertentu, tentu ada hal-hal yang sifatnya prioritas. Yang diprioritaskan pada masa waktu tertentu, *let's say* itu 5 tahun maka 5 tahun itu prioritasnya seperti apa. dalam konteks itu, maka seharusnya seluruh belanja KL itu mengarah kepada sasaran tadi, 5 tahun itu akan melakukan apa dan konvergensi ini sampai dengan besaran, volume, bahkan Kami di Bappenas mengatakannya itu harus sesuai tematiknya, *holistic, in the connected*.

Nah, disisi yang lain kita juga harus mendiligensi konvergensi dari seluruh belanja APBD yang di dalamnya ada kandungan transfer daerah. Seperti kita ketahui transfer daerah itu ada DAU, DAK, DID, sampai dengan dana desa. DAU sampai hari ini itu basisnya adalah 26% dari penerimaan bersih dan itu kata-kata

disitu sebenarnya adalah sekurang-kurangnya. Akan tetapi memang sampai hari ini Pemerintah masih menggunakan angka yang 26%.

Yang kedua, kalau DAU itu berfungsi untuk mengatasi *horizontal in balance* di seluruh wilayah Indonesia, maka ada instrument lain yang disebut dengan dana alokasi khusus untuk mengatasi atau menjadi instrument terhadap *vertical in balance*. *Vertical in balance* dan *horizontal in balance* itu sebenarnya bekerja dengan baik. DAU itu ada formula sayangnya DAK itu pada jamannya merujuk pada jaman saya di Panitia Anggaran DPR RI itu saya memaksa Pemerintah untuk ada formula. Tetapi sekarang itu tidak berbasis kepada formula tetapi proposal B.

Kemudian juga dengan Dana Insentif Daerah, DID itu pun harusnya menggunakan formula B tetapi yang dilakukan adalah proposal B. DID pada waktu itu, saya juga menjawab untuk dana desa nanti, itu dimaksudkan untuk *mem-balance* dan memberikan award kepada daerah ketika fiskal daerahnya itu naik tetapi *quote and quote* dihukum dengan perolehan DAU, karena otomatis dengan formula DAU ketika fiskal daerah naik tentu DAU-nya turun.

Kadangkala Pemerintah Daerah mengakalnya karena kenaikan PAD itu dengan kenaikan jumlah penduduk agar dia stabil. Karenanya di jaman itu bersama dengan teman-teman yang lain disini, saya kira ada Bapak Misbakhun, ada Bapak Agun pada waktu itu, kemudian Bapak Muhidin ini, itu di-*create original* Itu namanya Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah diberikan kepada daerah-daerah yang sukses atas PAD, kemudian secara komposit saya tambahkan lagi misalnya kalau IPM-nya naik, kalau tingkat kemiskinannya turun dan seterusnya. Saya kira itu jelas sekali DID. Jadi terkait dengan DAU, DAK saya kira saya setuju itu menjadi satu instrument dalam rangka pemerataan dan seterusnya.

Saya setuju dengan Bapak Agun bahwa dana desa tidak ada alasan hanya karena isu-isu yang negative terhadap dana desa. Dana desa itu instrument pemerataan sampai di tingkat di depan rumah tangga. Karena itulah yang kita harapkan dan proses *mem-balance* itu menyeimbangkan pada masyarakat-masyarakat yang kurang terutama dengan pendekatan target dalam bentuk *community general* dalam hal ini atau *community base* di desa itu tetap akan dipertahankan. Dan saya kira kalau kita hitung dalam jumlah yang lumayan besar, makin lama sebenarnya telah terjadi perubahan yang cukup signifikan di dalam APBN kita, yaitu yang disalurkan ke daerah.

Kemudian yang ketiga, mengenai proses perencanaan pembangunan nasional. Saya setuju sekali bahwa Musrenbangnas itu hanya meninggalkan kekecewaan. Kekecewaannya itu adalah karena diusulkan sekian jumlah puluh kegiatan, sekian puluh proposal dengan harapan ekspektasi yang sangat tinggi, tetapi kemudian ketika masuk di dalam APBN dan APBD itu tergerus bahkan hitungannya itu mungkin tinggal 8%, 11%, ya itulah hasil dari rebug nasional pembangunan. Ini menandakan bahwa memang kita punya kue pembiayaan pembangunan itu amat sangat besar.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Ketua, interupsi.

Pak Menteri, ini mumpung Bapak lagi membahas mengenai rencana pembagian kue ini Pak. Ini mumpung kita ini DPR RI periode awal, isu di DPR RI ini selalu Bapak bicara tentang Krisna, Sakti dan sebagainya. Ini kita berkeluh kesah, ngadu sama Bapak, kalau boleh kita mau mengadu soal bagaimana kita Anggota DPR RI ini bisa memegang masing-masing terhadap Daerah Pemilihan kita. Kita tidak mau pegang uang Pak, kita ingin pegang programnya Pak. Karena apa? kita ini disumpah memperjuangkan daerah pemilihan. Kita ini ingin tata kelola *government* bagaimana kita datang kepada Kementerian Keuangan, “Pak, silakan isi Krisna-nya Pak”, ya kita tidak mau isi nanti dikira kita main pat gulipat disitu Pak, tidak mau kita Pak. Kita ingin yang resmi, kesepakatan hukumnya jelas, kita mau minta tolong mau tidak Bappenas memperjuangkan nasib kami ini. Itu penting, karena kalau Bappenas merencanakan sejak awal, sudah mau dikasih berapa miliar kita terima dari Pemerintah, yang penting kita bisa meng-*marking* anggaran itu. Kita berharap Bappenas mau tidak memperjuangkan.

Terima kasih.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Baik, ini karena diinterupsi saya kira itu mengingatkan saya dengan perdebatan yang sebenarnya maaf, justru pada waktu itu Fraksi-fraksi yang tidak mau. Saya pernah mengusulkan di perubahan Undang-Undang MD3 soal politisme dan itu berlaku hampir diseluruh dunia terhadap Anggota DPR RI. Dan saya kira itukan akan lebih mudah diawasi oleh Anggota Dewan sampai Dapil. Dan untuk itulah kira-kira, problemnya memang saya tidak tahu berhentinya dimana hanya kemudian hanya ada kalimat bahwa setiap Anggota bisa mengusulkan kalau tidak salah di MD3.

Pada waktu itu kami saya ingat sekali di dalam rangka penyusunan Undang-Undang itu menyebut dalam bentuk nominal preventif tertentu dan kalau kita sebut suatu yang sebenarnya bisa dan itu sebenarnya bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang menukik langsung pada daerah-daerah yang memang lebih dikenal dan diketahui oleh Anggotanya. Itu bukan pandangan yang positif dan optimistik, tetapi seringkali mungkin dalam praktek-praktek dan sebagainya. Tapi saya setuju saya mau pakai ada *yield* yang dipakai oleh Bapak Agun, bahwa kalau ada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kurang pas jangan kemudian dihukum secara general. Saya mau lanjutkan Pak, perjuangan Bapak masih panjang, tapi saya akan coba. Boleh saya dapat tepuk tangan untuk itu.

Kalau posisinya begini saya senang sekali, jadi proses perencanaan pembangunan nasional saya kira pembagian kue yang tadi saya sampaikan sedemikian rupa. Karenanya kemudian banyak pembiayaan-pembiayaan alternative dan termasuk Ibu Kota Negara itu, Presiden memberikan pengarahannya *not anything sense* itu menjadi *cash out* dari Pemerintah, dari APBN, *not anything sense*. Jadi

memang kita harus punya cara pembiayaan yang kreatif termasuk misalnya tadi P3 maksud saya *private, public, partnership*, bukan partai Bapak Amir Uskara itu.

Kemudian jadi banyak cara Bapak Didi untuk itu, dan bisa saja nanti bentuk-bentuk Ibu Kota itu bukan hanya disebut dengan Ibu Kota Pemerintahan. Memang banyak sejarah dunia mengatakan ada sukses dan ada yang gagal, tetapi saya kira kita tidak mengaca disitu. Kita ingin meniti sejarah kita sendiri dan kita optimis berhasil dan memberikan contoh kepada dunia dalam rangka membuat sebuah Ibu Kota baru yang ramah lingkungan, kemudian menjadi sumber inspirasi masa depan, penuh dengan inovasi, dan sosial. Bahkan kalau bisa dibayangkan saya masih ketika bisa saya sampaikan disini, tadi juga disampaikan oleh Presiden dan juga dalam beberapa kali disampaikan oleh beliau banyak hal yang mestinya baru disana dalam bentuk layanan-layanan, layanan kesehatan yang harusnya untuk kesehatan yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia dan bisa menjadi rujukan internasional, layanan pendidikan kenapa tidak ada universitas-universitas dunia bisa masuk disitu, ada soal pariwisata kenapa mungkin ada satu tempat tujuan wisata yang hebat semacam Disney dan seterusnya.

Jadi mimpi itu memang ada, kan semua dimulai dari mimpi. Bung Karno memulai mimpi Ancol dan kemudian jadilah itu dan kemudian menjadi yang sekarang, kan kita tidak tahu perkembangannya. Tapi saya kira kita mesti optimis, ada secara *technical*, secara *techno classic* sudah saya jelaskan mengenai Ibu Kota Negara tetapi saya cuma dikasih waktu sebentar. Jadi satu ketika saja, jadi ada pembiayaan-pembiayaan alternative yang kita kembangkan. Kalau triple P tadi itu memang tidak semuanya bersifat pembiayaan 100% oleh swasta, ada proyek-proyek yang sifatnya kalau IRR-nya secara *visible, viability*-nya itu di bawah tidak menarik buat swasta yang tentu dibikin bagaimana supaya menarik, misalnya apakah ada dalam bentuk inkai. Jadi kalau misalnya jalan tol itu 100 KM, 20 KM dibangun oleh Pemerintah, 80 KM diambil oleh swasta, dan kemudian kalau masih kurang kita punya instrument yang lain, punya PTS, punya PGS. Jadi kalau ada gap untuk mengatasi IRR-nya kita masih bisa, tetapi semua ada hitungannya. Dan itu pasti kita securitisasi dan kita tetap akan menyelamatkan satu sen pun uang Rupiah dari APBN tidak akan kita pakai. Dan kita banyak aset Pak, dan saya sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan aset-aset yang ada.

Yang berikutnya adalah saya setuju soal kalau GBHN saya kira ini saya tidak dalam klausul untuk bicara soal GBHN. Skema-skema pembiayaan saya sudah sampaikan tadi, mengenai *middle income trap* secara khusus saya ingin sampaikan *middle income trap* itu sebenarnya Indonesia lolos masuk di *middle income* pada tahun 1990 berdasarkan susunan triple P, yaitu dengan angka dasar 1990 Indonesia itu sudah lolos masuk di *middle income* tapi pada waktu Cina masih di bawah, Tiongkok itu tahun 1998 baru diatas 2000 Dolar. Dan sekarang *Indonesia in the mid of middle income*, jadi kita persis di tengahnya. Jadi kalau lihat hitungannya kali 2000 ke 11.000 kita kira-kira di 7000-an hari ini, riilnya kalau PDB ya 4000-an. Nah, kita sudah di *middle* ini tetapi waktunya sudah terlalu lama kita disitu. Menurut ADB disana ahlinya itu diperlukan waktu setiap negara 28 tahun untuk bisa lolos, tapi kita sekarang sudah 30 tahun tapi masih di tengah-tengah itu.

Bagaimana kita atasi itu? tentu dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Tingkat pertumbuhan yang tinggi itu saya nanti bisa perlihatkan disini ada beberapa skenario tentu yang disitu bukan hanya GDP pertumbuhan dari hidup tetapi juga GDP perkapita growth itu harusnya sekitar 5% baru kita tahun 2030 kita masuk di *high* ekonomi. Jadi hitungan secara matematis yang secara sederhana sebenarnya karena basis kita besar sekarang itu kita sudah mendekati 2 triliun Dolar saya kira *one day* kita harus bangga dan optimis sebagai bangsa yang besar bahwa akhirnya kita sampai juga dengan seperti negara-negara yang lain.

Yang soal pemasaran Ibu Wartiah mohon maaf, saya tidak dalam posisi untuk menjawab ini, tetapi pemekaran memang harus kita lakukan dengan hati-hati. Yang saya tahu bahwa kita akan melakukan pemekaran hanya beberapa tempat secara Kemudian setuju saya mengenai ekonomi karya, saya baru saja beberapa hari bicara dengan teman-teman dari ... (suara tidak jelas) dan ketinggalan jauh padahal kita sudah lama menginisiasi, sudah mempromosikan, kalau kita lihat tonggak pertamanya pembentukan Bank Muamalat, tetapi perkembangannya itu sangat lambat. Tapi karena memang dia dari cara-cara pelayanan perbankan itu mudah-mudahan sekaligus dengan pendalaman struktur keuangan yang konvensional akan masuk ke dalam struktur keuangan Syariah dan kita akan bekerja sama dengan lembaga yang terkait dengan itu. Mudah-mudahan itu juga nanti baik Ibu Anis nanti bisa beli lagi Sukuk yang dengan bentuk-bentuk yang lain lagi.

Saya kira itu jawaban saya dan mudah-mudahan memuaskan dan untuk dari meja Pimpinan, saya ingin menyampaikan bahwa sudah dalam *partline* yang harus kita bayarkan itu, cuma kita harus tahan eksekusinya sesuai dengan kinerja yang menjadi bagian dari pekerjaan kami. Mudah-mudahan 90% itu juga kami capai.

Stunting saya kira tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan itulah yang bisa saya sampaikan pada Magrib sebagai pertemuan perdana. Saya setuju Ibu Vera, kita nanti membahas secara menyeluruh itu saya setuju kalau itu memungkinkan dan tidak mengigit atau menginjak kakinya komisi-komisi lain. Kalau itu memang diperkenankan *why not*.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas yang telah memberikan masukan dan jawaban dari pertanyaan Anggota dan Pimpinan Anggota Komisi XI DPR RI.

Kita langsung kepada kesimpulan.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si./F-P. NASDEM):

Ijin Bapak Ketua, sebelum kesimpulan ini Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas yang baru juga pertemuan perdana. Tadi tersinggung terkait dengan dana desa. Komisi XI DPR RI dua hari yang lalu dikejutkan oleh Menteri Keuangan, bahwa begitu banyak desa yang secara fisiknya tidak ada, tetapi secara regulasinya tercantum. Jadi kalau 72 triliun pada tahun ini Bapak Menteri bisa bayangkan berapa yang fiktif. Saya kebetulan Bapak Menteri, tahu persis di Maluku Utara di Halmahera Selatan berkali-kali berkunjung pulau-pulau kecil hampir 1.700 tidak ada penghuni tetapi kalau Bupati mencatat itu sebagai desa, kita bisa bayangkan berapa banyak 72 triliun sudah berapa tahun anggaran berturut-turut ini dihabiskan oleh Bupati. Ini permasalahannya Pak, dicek secara fisik pulau kecil, kucing saja tidak tinggal disana kok dianggap itu desa dan tercatat untuk mendapatkan dana desa.

Jadi barangkali ini Bapak Menteri, Komisi XI DPR RI berharap ini menjadi konsentrasi Bapak Menteri, sebab di parlemen ini semua provinsi menyuarakan terkait dengan tata kelola dana desa ini yang kacau balau. Komisi XI DPR RI yakin bahwa Bapak Menteri biar baru menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas tapi ilmunya lebih besar daripada itu, yakin saya Pak. Cuma perlu ada perhatian yang serius dan harus sinergitas dengan antar otoritas, kalau tidak celaka. Apalagi Bapak Menteri beberapa bulan kedepan ada 270 kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada Serentak. Ini kalau dropping tahap terakhir pasti ini akan menjadi ATM apalagi kalau Kepala Daerah itu dia *incumbent*.

Mudah-mudahan kami berharap Bapak Menteri dengan segala kapasitas dan kapabilitas bisa ikut meminimalis mengenai tata kelola yang kacau balau ini Pak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan tayangkan kesimpulan.

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IXI DPR RI dengan Kementerian PPN/Kepala Bappenas, Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, Rabu 6 November 2019.

4. Komisi XI DPR RI meminta Kementerian PPN/Kepala Bappenas meningkatkan koordinasi kegiatan di internal Kementerian supaya tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun.

Setuju ya, Pemerintah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi XI DPR RI meminta Kementerian PPN/Kepala Bappenas agar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024 dimasukkan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak terjebak pada kisaran 5%.

Bapak Menteri silakan.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Prinsipnya setuju, cuma bahasanya mungkin lebih optimis, yaitu dengan mengatakan bahwa menjadi “lebih dari 5%”.

KETUA RAPAT:

Oh, menjadi “lebih dari 5%” lebih bagus dong.

2. Komisi XI DPR RI meminta Kementerian PPN/Kepala Bappenas agar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024 dimasukkan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak terjebak pada kisaran lebih dari 5%.

Oke, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi XI DPR RI meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi XI DPR RI meminta Kementerian PPN/Bappenas supaya mengikutsertakan Komisi XI DPR RI dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Anggota pasti setuju dong, Pemerintah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi XI DPR RI meminta Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menerapkan kebijakan yang berbeda tiap wilayah di Indonesia terkait dengan dana desa sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Setuju?

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Ketua, saya nanya ini yang soal stunting, Komisi XI DPR RI meminta untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Meningkatkan komitmen ini maksudnya apa bahasa meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. Mereka ini tugasnya bukan untuk meningkatkan komitmen Pak, membuat perencanaan bagaimana stunting ini tapi ada lembaga-lembaga yang memang melaksanakan tugasnya melaksanakan itu bukan meminta Pak.

Jadi meminta ini bukan kita tugasnya meminta kepada Menteri PPN, tapi memberikan Bappenas bagaimana mengintegrasikan program penurunan stuntingnya boleh, tapi komitmennya juga bahasa ini harus kita sempurnakan, apa yang dimaksud dengan komitmen disini. Kalau membuat perencanaan dan sebagainya ini Pak, mohon maaf karena tadi Bapak saya belum membaca, Bapak membacakan baru kita kemudian Bapak langsung ketuk dan sebagainya. Bahasa meminta ini tidak bisa kita pakai Pak. Meminta Kementerian Bappenas dan meningkatkan pertumbuhan diminta masukan strategis, lah tugas mereka memang untuk melakukan itu, meminta inikan bukan peruntukan kita. Nah, ini kita harus memperbaiki kalimat kita jangan memakai bahasa meminta lagi.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Saya kira kata meminta bukan kita meminta-minta, ini bahasa baku yang saya kira tepat dalam konteks sebagai Anggota Dewan. Bukan meminta-minta ini, inikan daripada mendesak saya rasa lebih sopan meminta, meminta kepada mitra kerja kita. Jadi menurut hemat saya tepat ini kata meminta. Kalau mau diperbaiki substansi apa yang harus kita perbaiki dalam point-point ini.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Disini ini kita sedang melaksanakan tugas Pak, bahasa meminta itu kalau menurut saya ada pilihan lain yang bisa lebih tepat. Kita ini bukan meminta Pak, bagaimana memberikan, kalau kita mendorong, mendukung, melakukan, upaya, "Komisi XI DPR RI mendorong Kementerian PPN/Kepala Bappenas".

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Bapak Pimpinan, kemarin kita sempat bahas, kemarin apa mendorong, menyarankan, meminta, itu beberapa kata yang dalam EYD, kita sudah bicarakan kemarin Bapak Misbakhun. Masa kita mendorong atau memerintahkan, kemarin waktu kan ini sudah yang keempat atau yang kelima. Artinya, kemarin kita sudah sepakati kita meminta, meminta ini bukan artinya meminta-minta, beda meminta dengan meminta-minta, dalam eyd itu beda. Kalau kita meminta-minta kita mengharap sesuatu, kalau kita minta artinya Komisi XI DPR RI minta artinya minta pertolongan. Kalau memang Tupoksinya harus tidak kata meminta kita harus diskusi ulang seluruh kesimpulan rapat Komisi harus kita bongkar ulang. Karena ini sudah penghujung, sudah mau Magrib kita sepakati dulu ini, kalau mau ada perubahan besok atau lusa kita bicara lagi atau mengundang tata bahasa disini.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Sebentar, biar tidak berkelanjutan karena sudah mau Magrib. Jadi begini Bapak Misbakhun, kemarin kita rapat dengan Menteri Keuangan, dengan LPS, ini sudah kita pernah perdebatkan. Maksudnya bisa meminta, bisa mendorong, kita sepakat semua menggunakan kata meminta. Nah, itu sudah kita sepakati bersama dan sudah ada ahli bahasanya, meminta itu bukan berarti meminta-minta, seperti mendorong, menghimbau, kira-kira begitulah dalam bahasa yang bisa dipakai.

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.i):

Ijin Pimpinan, taadi pointnya terkait dengan penurunan stunting itu Pimpinan, tadi pointnya terkait penurunan stunting karena kalau Bappenas bukan sebagai pelaksana program adalah membaut desain atau planning penurunan stunting yang komprehensif, itu pointnya. Yang kedua, mengintegrasikan seluruh KL terkait dalam rangka melaksanakan program tersebut. Pointnya dua itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi redaksional saja ya.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan, sebetulnya bukan hanya untuk stunting saja, tapi sebetulnya untuk proyek-proyek yang strategis atau program-program yang prioritas bukan hanya stunting saja. Kemudian nanti seakan-akan Bappenas itu hanya stunting saja.

KETUA RAPAT:

Oke, kalimatnya bagaimana Pak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Jadi stuntingnya diganti menjadi program-program prioritas atau proyek-proyek prioritas, program prioritas nasional. Tadi bahasa Bapak Menteri dimasukkan saja Pak. Program Prioritas agar konvergen, ini konvergen sangat penting ini, kalimatnya Bapak Menteri itu.

KETUA RAPAT:

Oke ya, setuju ya?

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak, saya agak bingung dengan kalimat begini “agar tidak terjebak pada lebih dari 5%”.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (SUHARSO MONOARFA):

Kami tadi “agar menjadi lebih”.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Agar tidak terjebak pada lebih dari ini, bagaimana?

KETUA RAPAT:

Agar menjadi lebih dari 5%. **(rekaman terputus)**

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Tidak, saya bukan begitu Pak, kasihan dengan Bapak Menteri, Bapak Menteri kan hanya merencanakan, itu substansinya. Eksekusinya itu ada di KL, bukan apakah Bappenas punya anggaran stunting.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (SUHARSO MONOARFA):

Perencanaan, kami hanya merencanakan Bapak, jadi kami tidak melakukan eksekusi. Jadi kita mendesain dalam pelaksanaan program itu, jadi kita tidak masuk dalam pelaksanaan program.

KETUA RAPAT:

Jadi perencanaan desain untuk KL yang lain.
Oke, setuju ya tidak ada masalah.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P.):

Kalimatnya Pimpinan.

Kalau kita daftarkan termasuknya ini akan jadi banyak menurut saya, stunting sudah masuk dalam program prioritas kan Pak, sudah tidak usah disebutkan lagi. Karena kalau kita mau sebutkan lebih cocok dengan 4 pilar visi Pemerintah itu. Di sini ada SDM dan Ristek, ada ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, ketahanan nasional dan tata kelola, itu lebih bunyi Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, daripada dimasukkan 4 pilar lagi mending kita keluarkan saja deh. Lebih banyak lagi sosialisasi MPR 4 pilar, jadi kita keluarkan saja setuju, tidak apa-apa Pak Menteri kita keluarkan ya.

F-PG (Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Agun.

F-PG (Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.):

Kalau saya bukan soal masuk atau keluar, jangan sampai nanti Komisi kita tidak sensitive dengan isu ini.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi usulannya apa Pak Agun.

F-PG (Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.):

Tidak ada masalah stunting masuk Pak, ini isu internasional yang juga harus menjadi *care* negara kita Pak.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Pimpinan, sedikit.

Saya kira jalan tengah yang disodorkan Bapak Menteri tadi saya rasa kalimat yang bagus. Karena prioritasnya kan disampaikan, lalu ingin penekanan stunting tidak masalah. Kan juga ini pada tingkat perencanaan, jadi bisa dimengerti. Kalimat yang disampaikan Bapak Menteri menurut hemat saya tepat itu.

KETUA RAPAT:

Oke baik, Bapak Fauzi Amro ikhlas?

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Saya tetap Pak, saya cuma menganggap Bappenas ini badan perencanaan. Artinya, titik sudah sampai situ saja Pak, prioritasnya nanti di KL kalau mau.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Pimpinan, kita kan ada sesi pra khusus dengan para Deputy, itu kita elaborasi lagi untuk point 3. Jadi inikan baru *exercise* saja, pada rapat berikutnya masuk pada definisinya, prioritas itu a, b, c. Tapi kalau mau disebutkan stunting ya tidak ada masalah, tapi jangan sampai ini selesai ini nomor 3, ini *to be continue* masih koma nomor 3.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi begini saja nanti kita lanjutkan dengan Eselon I, kalau perlu kita masukkan kita masukkan.

Jadi “Komisi XI DPR RI meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk membuat desain dalam pelaksanaan program prioritas nasional yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia”.

Oke, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi XI DPR RI meminta Kementerian PPN/Bappenas supaya mengikutsertakan Komisi XI DPR RI dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi XI DPR RI meminta Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menerapkan kebijakan yang berbeda tiap wilayah di Indonesia terkait dengan dana desa sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Pemerintah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, dengan demikian 5 kesimpulan telah kita sepakati bersama. Maksudnya dana Dapil itu sudah dimasukkan.

Baik, dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja kita pada sore hari ini bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Sebelum kita tutup kami persilakan kepada Bapak Menteri untuk memberikan *closing statement*.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (SUHARSO MONOARFA):

Pertama, syukur *alhamdulillah* kita sampai pada satu kesimpulan Rapat Kerja. Dan mudah-mudahan saya berharap kita bisa bekerja sama lebih baik lagi. Saya bergembira sekali, karena diskusi hari ini cukup hidup dan mungkin teman-teman yang lain kasih ingat saya, saya itu pekerja detail. Jadi saya senang kalau memang kita bisa berdiskusi secara detail. Dan saya akan tungguin tidak akan saya tinggalkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, dengan mengucapkan hamdalah, *alhamdulillahirabil'alam* Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas saya nyatakan ditutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.28 WIB)

Jakarta, 6 November 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**

